

SKRIPSI
ANALISIS FUNGSI KEPALA DESA DALAM KERANGKA
OTONOMI DESA, DI DESA MUARA BUNGKAL KECAMATAN
SUNGAI MANDAU
KABUPATEN SIAK



OLEH :
IKA YATI
NIM. 10875004502

JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
1433 H/ 2012 M

ABSTRAK

ANALISIS FUNGSI KEPALA DESA KERANGKA OTONOMI DESA DIDESA MUARA BUNGKAL KECAMATAN SUNGAI MANDAU KABUPATEN SIAK

Oleh:

IKA YATI
NIM. 10875004502

Penelitian Ini Dilakukan di Desa Muara bungal kecamatan sungai mandau kabupaten siak Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu dikarenakan tidak terealisasinya beberapa pembangunan yang sudah direncanakan, hal ini dapat dilihat diantaranya pada pengerasan jalan, pengaspalan jalan poros desa, pos penimbangan bayi, pembangunan gedung SD, dan pembangunan gapura desa, ini disebabkan masih kurangnya penentuan lokasi pada pembangunan, kurangnya transparansi pada biaya yang digunakan, dan pada keterlibatan masyarakat dalam perencanaan.

Dalam penelitian ini, pelaksanaan fungsi kepala desa dalam kerangka otonomi desa didesa muara bungal kecamatan sungai mandau Kabupaten Siak dilihat berdasarkan Peraturan Bupati Siak Nomor 14 Tahun 2007 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik questioner, dan wawancara. Responden dalam penelitian ini berjumlah 58 orang. Kemudian teknik analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian adalah bersifat deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis data yang telah terkumpul, ditabulasikan menurut jenis data, dan memberi keterangan dengan mengaitkan dengan teori yang sesuai dengan permasalahan yang ada dan memberi interpretasi terhadap hasil yang relevan yang kemudian diambil kesimpulan dan saran.

Dari hasil pengukuran terhadap masing-masing indikator, maka dapat dinyatakan bahwa perencanaan dan pelaksanaan pelaksanaan fungsi kepala desa dalam kerangka otonomi desa didesa muara bungal kecamatan sungai mandau Kabupaten Siak dinyatakan dalam kategori kurang baik. Hal ini disebabkan oleh masih kurangnya penentuan lokasi pada pembangunan, kurangnya transparansi pada biaya yang digunakan, dan pada keterlibatan masyarakat dalam perencanaan. Oleh sebab itu penulis menyarankan agar dalam pembangunan harus bisa menentukan ketepatan sasaran dengan baik, memenejemen kegiatan, dan partisipasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Batasan Masalah	8
1.4 Sistematika Penulisan	9
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
1.1 Otonomi Daerah.....	11
1.2 Otonomi Desa	14
1.3 Pengertian Desa	16
1.4 Pengertian Kepala Desa	19
1.5 Konsep Islam Tentang Kepemimpinan	20
1.6 Tugas dan Fungsi Kepala Desa.....	22
1.7 Landasan Yuridis Otonomi Desa	23
1.8 Konsep Operasional	24
1.9 Teknik Pengukuran	26
1.10 Kerangka Pemikiran	36
 BAB III METODE PENELITIAN	
1.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	38
1.2 Populasi dan Sampel.....	38
1.3 Jenis dan Sumber Data.....	39
1.4 Teknik Pengambilan Data.....	40
1.5 Teknik Analisa Data	40

BAB IV	GAMBARAN UMUM LOKASI	
	A. Keadaan Geografis.....	42
	B. Pemerintah	43
	C. Biografi Kepala Desa.....	45
	D. Keadaan Penduduk	45
	E. Mata Pencarian	46
	F. Kehidupan Sosial Keagamaan	47
	G. Pendidikan	47
BAB V	ANALISA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	
	5.1. Identitas Responden.....	49
	5.2 Hasil Penelitian.....	52
	5.3 Analisis Data.....	94
BAB VI	PENUTUP	
	6.1. Kesimpulan	98
	6.2. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA		

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel. 1.1 : Program Kerja Desa Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak. Tahun 2012	3
Tabel 1.2 : Data Pertemuan Atau Rapat Kepala Desa, Desa Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak Pada Tahun 2011.....	6
Tabel 2.1. : Operasional Variabel Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Mewujudkan Otonomi Desa di Desa Muara Bungkal Kabupaten Siak	24
Tabel IV. 1 : Jumlah penduduk perdesa desa Muara Bungkal	47
Tabel IV.2 : Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian di desa Muara Bungkal, Kecamatan Sungai Mandau, Kabupaten Siak.....	47
Tabel IV.3 : Jumlah sarana ibadah di desa Muara Bungkal	48
Tabel V.1 : Tingkat pendidikan responden masyarakat Desa Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak.....	50
Tabel V.2 : Golongan umur atau usia responden masyarakat Desa Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak.....	51
Tabel V. 3 : Jenis kelamin responden desa Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak	52
Tabel V.4 : Tangapan Responden, Tentang Kemampuan Kepala Desa	53
Tabel V.5 : Tangapan Responden Tentang, Kemampuan Kepala Desa Dalam Memberikan Petunjuk Kepada Masyarakat....	54
Tabel V.6 : Tangapan Responden Tentang, Kemampuan Kepala Desa Dalam Memberikan Saran Kepada Masyarakat.....	54
Tabel V.7 : Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Fungsi Kepala Desa Dalam Melaksanakan Pembinaan Masyarakat Desa. di Desa Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak	55
Tabel V.8 : Tangapan Responden Tentang Kemampuan Kepala Desa Dalam Memberikan penyuluhan Kepada Masyarakat di bidang pertanian perkebunan, dan pembangunan.....	58
Tabel V.9 : Tangapan Responden Tentang Kemampuan Kepala Desa Dalam Memberikan bimbingan Kepada Masyarakat di bidang pertanian perkebunan, dan pembangunan.....	58

Tabel V.10 : Rekapitulasi Tangapan Responden Tentang Pembinaan perekonomian Desa, Kemampuan Kepala Desa Dalam Memberikan penyuluhan Kepada Masyarakat di bidang pertanian perkebunan, dan pembangunan.....	59
Tabel V.11 : Tangapan Responden Tentang Kemampuan Kepala Desa membentuk satuan keamanan lingkungan.....	62
Tabel V.12 : Tangapan Responden Tentang kemampuan Kepala Desa mengerakan masyarakat untuk berkerja sama dalam memelihara keamanan lingkungan.....	62
Tabel V.13 : Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Fungsi Kepala Desa Dalam Memelihara ketentraman dan ketertiban dan masyarakat desa di Desa Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak.....	62
Tabel V.14 : Tangapan Responden Tentang Melaksanakan Musyawarah Perselisihan Desa Dengan Mengambil Kebijakan dan Keputusan yang Adil.....	66
Tabel V.15 : Tangapan Responden Tentang Melaksanakan Musyawarah Perselisihan Desa Dengan memberikan alternatif – alternatif penyelesaiannya.....	66
Tabel V.16 : Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Fungsi Kepala Desa Dalam, Melaksanakan musyawarah penyelesaian perselisihan masyarakat desa, di Desa Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak.....	67
Tabel V.17 : Tangapan Responden Tentang Menyusun Rancangan Peraturan yang Sesuai Dengan Kepentingan Masyarakat	69
Tabel V.18 : Tangapan Responden Tentang menyusun dan merancang peraturan desa bersama BPD, mengenai menyusun rancangan peraturan yang memperhatikan kesejahteraan secara umum	70
Tabel V.19 : Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Fungsi Kepala Desa Dalam Menyusun dan merancang peraturan desa dengan persetujuan BPD di Desa Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak.....	71
Tabel V.20 : Tangapan responden mengenai kemampuan kepala desa dalam membuat perencanaan pembangunan sesuai denagn kebutuhan desa	74
Tabel V.21 : Tangapan responden mengenai kemampuan kepala desa dalam membuat perencanaan pembangunan dengan menentukan tujuan dari pelaksanaan pembangunan teresebut	74
Tabel V.22 : Tangapan responden mengenai kemampuan kepala desa dalam membuat perencanaan pembangunan	

	dengan membuat langkah-langkah dalam pelaksanaan pembangunan tersebut	75
Tabel V.23	: Tangapan responden mengenai kemampuan kepala desa dalam membuat perencanaan pembangunan dengan menanggapi aspirasi masyarakat dalam merumuskan perencanaan pelaksanaan pembangunan tersebut.....	76
Tabel V.24	: Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Fungsi Kepala Desa Dalam Membuat Perencanaan Pembangunan Sesuai Dengan Kebutuhan Desa di Desa Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak.....	77
Tabel V.25	: Tangapan responden mengenai kemampuan kepala desa dalam mengerahkan masyarakat dan aparat desa untuk berkerjasama dalam pelaksanaan pembangunan.....	79
Tabel V.26	: Tangapan responden mengenai kemampuan kepala desa mengendalikan masyarakat dan aparat desa dalam pelaksanaan pembangunan	80
Tabel V.27	: Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Fungsi Kepala Desa Dalam Memberikan pengarahan kepada bawahan atau masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak	81
Tabel V.28	: Tangapan responden mengenai kemampuan kepala desa dalam mengambil keputusan dalam proses penyelenggaraan pembangunan.....	83
Tabel V.29	: Tangapan responden mengenai kemampuan kepala desa dalam Memilih alternatif terbaik dalam menetapkan keputusan dalam pelaksanaan pembangunan.....	84
Tabel V.30	: Tangapan responden mengenai kemampuan kepala desa Tegas dalam menetapkan keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan.....	84
Tabel V.31	: Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Fungsi Kepala Desa Dalam Mengambil Keputusan Dalam Proses Penyelenggaraan Pembangunan di Desa, Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak.....	85
Tabel V.32	: Tangapan responden mengenai kemampuan kepala desa dalam mengkoordinir pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan pembangunan	88
Tabel V.33	: Tangapan responden mengenai kemampuan kepala desa dalam Pembagian tugas terhadap pihak terkait, (aparat desa, pemuka masyarakat, dan masyarakat desa	88

Tabel V.34 : Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Fungsi Kepala Desa Dalam Mengkoordinir Penyelenggaraan Pembangunan, di Desa Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak	89
Tabel V.35 : Tangapan responden mengenai kemampuan kepala desa dalam mengawasi semua aktifitas –aktifitas dalam proses penyelenggaraan pembangunan desa, Kepala desa memonitor kegiatan pelaksanaan pembangunan.....	92
Tabel V.36 : Tangapan responden mengenai kemampuan kepala desa dalam mengawasi semua aktifitas-aktifitas dalam proses penyelenggaraan pembangunan desa, Memperbaiki penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan.....	93
Tabel V.37 : Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Fungsi Kepala Desa Dalam, Mengawasi Semua Aktifitas-Aktifitas Dalam Proses Penyelenggaraan Pembangunan Desa.di DesaMuara Bungkal KecamatanSungai Mandau Kabupaten Siak.....	93
Tabel V.38 : Rekapitulasi Keseluruhan Hasil Penelitian Tentang Fungsi Kepala Desa Dalam Mewujudkan Otonomi Desa.di DesaMuara Bungkal KecamatanSungai Mandau Kabupaten Siak.....	96

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 : Kerangka pemikiran : Analisis Fungsi Kepala Desa Dalam Mewujudkan Otonomi Desa Di Desa Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak.....	37
Gambar 4.1 : Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Muara BungkalKecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak.....	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Otonomi Desa merupakan Otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati Otonomi asli yang dimiliki oleh Desa tersebut. **Haw. Widjaja (2003: 165)**

Otonomi bermacam-macam. Ada otonomi berian, ada otonomi kuhonan, dan ada otonomi bawaan. Sudah jelas, otonomi daerah ala Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah otonomi berian yaitu otonomi yang diberikan kepada suatu masyarakat (hukum), supaya masyarakat itu pada suatu saat berkemampuan menjadi daerah otonomi benaran. Otonomi kuhonan adalah otonomi yang diberikan oleh negara kepada suatu masyarakat (hukum) berdasarkan permohonan masyarakat itu, karena masyarakat itu terbukti berkemampuan sebagai daerah otonomi. Otonomi desa adalah otonomi bawaan (bersendikan adat dan agama) masyarakat sejak lahirnya, sama seperti setiap orang mempunyai *privacy* dalam dirinya, dan Negara mempunyai kaulatan. *Privacy* itu pada masyarakat disebut otonomi. (Ndraha, 2006 : 560)

Otonomi desa, secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintah di indonesia jauh sebelum Negara dan bangsa ini terbentuk, desa merupakan instutisi yang otonomi dengan trdisi, adat dan hukumnya tersendiri serta relatif mandiri hal ini ditunjukan dengan tingkat

keragaman yang tinggi membuat desa merupakan wujud bangsa yang paling kongrit Kewenangan desa mencakup kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa.

hakekatnya menunjukan besaran kewenangan yang dimiliki pemerintah desa yaitu, desa membentuk persekutuan masyarakat yang mempunyai hukum, tata kerama, adat istiadat, dan hak-hak wilayahnya, seperti hukum-hukum yang terdapat di Desa Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak, disini dicontohkan salah satunya, didalam hukum adat pernikahan, didalam hukum adat ini dilarang menikah sesama suku, didalam proses resepsi pernikahan ada tiga tahap, yaitu, tahap merisik, mengantar tanda, resepsi pernikahan, didalam menyelesaikan masalah harus diselesaikan dengan pemangku adat terlebih dahulu, dalam tata kerama yang tua harus sopan santun, dan dihormati, dilarang bagi laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim begaul melewati batas yang telah ditentukan adat, hak-hak wilayah seperti batas-batas daerah dicontohkan batas dusun itu didasarkan batas yang ditentukan oleh ninik mamak, sesukuan atau persekutuan yang terdahulu.

Berdasarkan peraturan daerah kabupaten siak No 14 tahun 2007, tentang pedoman organisasi dan tata kerja pemerintah desa, fungsi kepala desa, yaitu : Membina masyarakat desa, misalnya melakukan pembinaan agama dengan membentuk remaja masjid, membina Perekonomian Desa, salah satunya dengan datangkan pakar-pakar pertanian dalam upaya untuk meningkatkan hasil perkebunan masyarakat, Memelihara Ketentraman dan Ketertiban, dengan membentuk satuan keamanan,(poskamling), Pelaksanaan Musyawarah

Perselisihan Masyarakat, seperti musyawarah perselisihan masalah batas tanah masyarakat,

Pembuatan Peraturan Desa. Dalam membuat peraturan dan merancang peraturan desa haruslah mengacu pada kepentingan masyarakat desa dan pada kesejahteraan masyarakat. Membuat perencanaan Perencanaan, dalam membuat perencanaan sesuai dengan kebutuhan desanya, Mengarahkan, Pengambilan Keputusan, Mengkoordinasikan, dan Pengawasan. Fungsi ini harus dijalankan oleh kepala desa dalam pelaksanaan fungsi nya untuk menjaga otonomi desa yang telah ada sebelumnya, seperti melestarikan adat istiadat, batas wilayah, kesatuan masyarakat, dan kemandirian desa yang lainnya. pembangunan di wilayah Desa Muara Bungkal, Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak.

Berikut program kerja desa Muara Bungkal, Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak, yang penulis susun dalam bentuk Tabulasi:

Tabel. 1.1 : Program Kerja Desa Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak. Tahun 2012

No	Bidang kegiatan	Programkerja	Terlaksana(%)	Belum Terlaksan(%)
1	Urusan Pemerintah	1. Pengurusan pembuatan KK dan KTP bagi masyarakat yang belum mempunyai KK dan KTP. 2. Penyelenggaraan Buku Administrasi Desa. 3. Pencatatan Monografi Desa. 4. Administrasi Pertanahan atau pembuatan surat tanah untuk masyarakat.	100% 100% 100% 50%	- - - 50%
	Urusan Pembangunan	1. Program air bersih. 2. Box culvert. 3. Perbaikan jalan semenisasi 4. Pembangunan jalan pemda. 5. Pembuatan lahan perkebunan lahansawituntuk masyarakat dan koperasi 6. Menyusun anggaran belanja desa.	100% 100% 100% 40% 100% 100%	- - - 60% - -
3	Urusan Kesejahteraan Rakyat	1. Pembentukan kelompok tani. 2. Memberiken alat tangkap ikan untuk nelayan. 3. Bantuan binatang ternak untuk masyarakat, 4. Dan pembangunan rumah layak huni.	100% 20% 40% 20%	- 80% 60% 80%

Sumber : Kantor Desa Muara Bungkal 2012

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat ada enam program kerja yang belum terlaksana dengan baik ,yaitu :

1. Bidang Urusan Pemerintah

Di bidang urusan pemerintah program kerjanya meliputi yaitu: Pengurusan pembuatan KK dan KTP bagi masyarakat yang belum mempunyai KK dan KTP, Penyelenggaraan buku Administrasi Desa, Pencatatan Monografi Desa. Dan Administrasi Pertanahan atau pembuatan surat tanah untuk masyarakat. dari beberapa program tersebut terdapat program yang belum terlaksana dengan baik yaitu dibidang administrasi pertanahan atau pembuatan surat tanah untuk masyarakat, ini disebabkan oleh pihak kecamatan tidak memberikan persetujuan apabila masyarakat tidak mempunyai surat dasar yang disetujui oleh kepala desa sebelumnya dengan alasan karena desa Muara Bungkal dikelilingi oleh konsensi perusahaan. Sedangkan kebanyakan masyarakat tidak memiliki surat dasar tersebut.

2. Urusan Pembangunan

Dibidang urusan pembangunan program kerjanya meliputi sebagai berikut: Program air bersih, Box culvert, Perbaikan jalan semenisasi, Pembangunan jalan pemda, Pembuatan lahan perkebunan lahan sawit untuk masyarakat, Kopersi, dan Menyusun anggaran belanja desa, untuk di konsultasikan dengan BPD dari beberapa program tersebut terdapat beberapa program yang belum terlaksana dengan baik yaitu: yang pertama di bidang pembangunan jalan pemda, karena kurang mendapat perhatian dari pemerintah daerah, dan dana yang dapat dari pemerintah daerah hanya cukup untuk membuat bakal jalanya saja.

3. Urusan Kesejahteraan Rakyat

Bidang urusan kesejahteraan rakyat program kerjanya meliputi yaitu: Pembentukan kelompok tani, Memberikan alat tangkap ikan untuk nelayan, dan bantuan binatang ternak untuk masyarakat, Dan pembangunan rumah layak huni. Dari beberapa program kerja tersebut yang belum terlaksana yaitu: dibidang pembangunan rumah layak huni, program ini belum bisa berjalan disebabkan oleh pihak desa belum bisa menyediakan lahan untuk pembangunan perumahan layak huni tersebut, karena pembangunan rumah layak huni ini membutuhkan lahan yang luas, sementara lahan yang dimiliki desa tidak mencukupi, dan masyarakat tidak bisa mengorbankan lahan mereka karena lahan tersebut merupakan sumber kehidupan baginya, selanjutnya program Memberikan alat tangkap ikan untuk nelayan, dan bantuan binatang ternak untuk masyarakat, program ini tidak bisa berjalan dengan baik karena bantuan yang diberikan tidak dikelola dengan baik, dan juga kurang mendapatkan perhatian atau pengawasan dari pemerintah desa.

Dan berikut penulis cantumkan data kegiatan pertemuan atau rapat kepala desa, Desa Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak yang penulis susun dalam bentuk tabulasi.

Tabel 1.2. Data Pertemuan Atau Rapat Kepala Desa, Desa Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak Pada Tahun 2011

No	Tempat & Tanggal	Jenis Kegiatan	Jumlah yang Hadir	Jumlah yang Tidak Hadir
1.	Muara Bungkal, 29 September 2011	Rapat Kelompok Nelayan Untuk Bantuan Alat Tangkap Ikan	20 Orang	30 Orang
2.	Muara Bungkal, 01 Desember 2011	Rapat Pembentukan Pengurus Kelompok Tani.	20 Orang	40 Orang
3.	Muara bungkal 29 september 2011	Permohonan bantuan untuk kelompok ternak harap jaya.	10 orang	30 orang

Sumber : kantor desa muara bungkal 2012

Berdasarkan tabel rapat atau pertemuan kepala desa Muara Bungkal, Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak pada tahun 2011, adapun kegiatannya sebagai berikut:

1. Kegiatan rapat kepala desa dengan kelompok nelayan sejahtera pada tanggal 29 September 2011 yang dihadiri sebanyak 20 orang, yang tidak hadir 30 orang kegiatan ini membahas tentang kegiatan usaha dibidang perikanan.
2. Pembentukan Kelompok Petani. Kegiatan rapat atau pertemuan kepala desa dengan masyarakat, pada tanggal 01 Desember 2011, bertujuan membentuk kelompok tani, dalam rangka untuk melaksanakan pemanfaatan lahan yang belum produktif menjadi lebih produktif, yang hadir sebanyak 20 orang dan yang tidak hadir sebanyak 40 orang.

3. Bantuan untuk kelompok ternak harapan jaya. Kegiatan Rapat atau pertemuan kepala desa dengan kelompok ternak harapan jaya, pada tanggal, 29 september 2011, dalam rangka untuk melaksanakan pengembangan di sektor peternakan. Karena dilihat sumber daya alam yang ada di desa Muara Bungkal cukup mendukung terhadap ketersediaan makanan hijau ternak dan rumput untuk keberlangsungan proses budidaya ternak.

Namun dari beberapa kegiatan yang ada di atas masyarakat lebih banyak yang tidak berpartisipasi atau tidak ikut serta, ini disebabkan oleh masyarakat terlalu sibuk dengan aktifitasnya masing-masing, dan bersikap apatis dengan lingkungan sekitar.

Berdasarkan fenomena-fenomena di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul: **“Analisis Fungsi Kepala Desa Dalam Kerangka Otonomi Desa, di Desa Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pelaksanaan fungsi kepala desa dalam kerangka Otonomi Desa di Desa Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak.

- b. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Fungsi dan Tugas kepala desa dalam Kerangka otonomi desa, di Desa Muara Bungkal, Kecamatan Sungai Mandau, Kabupaten Siak.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Bagi penulis sebagai wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang diperoleh dalam masa perkuliahan, untuk diterapkan dalam kehidupan nyata.
- b. Sebagai bahan masukan dan informasi bagi Kepala Desa mengenai pentingnya pelaksanaan tugas dan fungsinya dengan baik.
- c. Sebagai bahan acuan bagi penulis selanjutnya yang tertarik untuk meneliti masalah yang sama di daerah yang berbeda.

1.4. Sistematika Penulisan

Bab I : PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan menyajikan, beberapa teori yang melandasi penulisan, konsep operasional.

Bab III : METODE PENELITIAN.

Dalam bab ini akan di cantumkan lokasi penelitian, populasi, sampel, jenis dan suber data dan analisis data.

Bab IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.

Bab ini akan dibahas tentang keadaan geografis, keadaan penduduk,

matapencaharian, kehidupansosial, keamanan, pendidikan transportasi dan sturuktur organisasi desa.

Bab V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

Dalam Bab ini penulis akan membahas mengenai hasil penelitiandan evaluasi terhadap hasil penelitian.

Bab VI : KESIMPULANDAN SARAN.

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran yang diprerooleh dari bab sebelum nya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Berdasarkan undang-undang no 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah juga mengatur mengenai desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistim pemerintah yang diakui dalam sistim pemerintah nasional. Dengan pengertian tersebut dengan jelas bahwa undang-undang ini memberikan dasar, *self governing komunity*, yaitu komunitas yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai kondisi dan social setempat, maka posisi dimiliki otonomi sangat strategis sehingga memerlukan perhatian seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah karena otonomi desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah.

Selanjutnya dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa pemerintah adalah :

1. Keanekaragaman, memiliki makna bahwa istilah desa dapat disesuaikan dengan asal usul dan kondisis social budaya masyarakat setempat seperti kampung, nagari, wanua, dati, dusun, dan marga. Halini berate pola penyelenggaraan pemerintah desa akan menghormati sistim nilai yang berlaku dalam adat istiadat dan budaya setempat.
2. Partisipasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerinta desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat turut

bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga Indonesia.

3. Otonomi asli, memiliki makna bahwa kewenangan masyarakat setempat didasarkan pada hak-hak, asal usul dan social budaya yang ada pada masyarakat setempat, namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi modern.
4. Demokrasi memiliki makna bahwa kewenangan pemerintah desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat setempat yang diartikulasi dan agresikan melalui badan permusyawaratan desa diabdikan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan priritas kebutuhan hidup masyarakat.

2.1.Otonomi Daerah

Tidak ada yang dapat menafikan kenyataan seperti yang kita hadapi sekarang bahwa agenda otonomi daerah merupakan sebuah agenda nasional yang sangat penting dan telah menjadi agenda publik yang utama di tengah-tengah dalam menghadapi persoalan bangsa yang semakin kompleks dan tidak jelas arahnya.

Otonomi daerah ini merupakan fenomena politis yang sangat dibutuhkan dalam era globalisasi dan demokrasi, apalagi jika dikaitkan dengan tantangan masa depan memasuki era perdagangan bebas yang antara lain ditandai dengan

tumbuhnya berbagai bentuk kerjasama regional, perubahan pola atau sistem informasi global.

Melalui otonomi diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan pemerintah pusat diharapkan tidak terlalu aktif mengatur daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu memainkan peranannya dalam membuka peluang memajukan daerah dengan melakukan identifikasi potensi sumber-sumber pendapatannya dan mampu menetapkan belanja daerah secara ekonomi yang wajar, efisien, efektif termasuk perangkat daerah meningkatkan kinerja, mempertanggungjawabkan kepada pemerintah atasannya maupun kepada publik/masyarakat.

Salah satu tawaran solusi atas berbagai masalah pemberlakuan otonomi daerah adalah memahami kembali hakikat desentralisasi. David Hulme dan Mark (dalam Wicaksono, 2006:45) menyatakan desentralisasi merupakan pelimpahan kewenangan dalam rangka penyediaan layanan dari pemerintah pusat (individu atau agen) kepada individu yang lebih dekat dengan publik yang akan dilayani.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 tentang Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah : “Kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Widjaja (2007: 17) otonomi adalah penyerahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan. Tujuan otonomi adalah mencapai efektivitas dan efisiensi dalam

pelayanan kepada masyarakat. Tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan tugas ini antara lain menumbuhkembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan.

Otonomi daerah adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Dengan demikian, desentralisasi sebenarnya menjelma otonomi masyarakat setempat untuk memecahkan berbagai masalah dan pemberian layanan yang bersifat lokalitas (daerah setempat) demi kesejahteraan masyarakat yang bersangkutan.

Otonomi daerah juga merupakan sarana kebijakan yang secara politik ditempuh dalam rangka memelihara keutuhan negara, karena dengan otonomi ini akan kembali memperkuat semangat kebangsaan serta persatuan dan kesatuan diantara segenap warga bangsa ini.

Menurut Koswara (dalam Awang 2010 : 51) otonomi daerah adalah hak yang mengikuti pembagian wewenang kepada organ-organ penyelenggara negara. Manan (dalam Awang 2010 : 52) menyatakan otonomi mengandung arti kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan (rumah tangganya) sendiri. Dan Sarundajang (dalam Awang 2010 : 52) otonomi yaitu hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri tanpa adanya campur tangan dan intervensi pihak lain.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip

otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

2.2.Otonomi Desa

Otonomi bermacam-macam. Ada otonomi berian, ada otonomi kuhonan, dan ada otonomi bawaan. Sudah jelas, otonomi daerah ala Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah otonomi berian yaitu otonomi yang diberikan kepada suatu masyarakat (hukum), supaya masyarakat itu pada suatu saat berkemampuan menjadi daerah otonomi benaran. Otonomi kuhonan adalah otonomi yang diberikan oleh negara kepada suatu masyarakat (hukum) berdasarkan permohonan masyarakat itu, karena masyarakat itu terbukti berkemampuan sebagai daerah otonomi. Otonomi desa adalah otonomi bawaan (bersendikan adat dan agama) masyarakat sejak lahirnya, sama seperti setiap orang mempunyai *privacy* dalam dirinya, dan Negara mempunyai kadaulatan. *Privacy* itu pada masyarakat disebut otonomi.(Ndraha, 2006 : 560)

Haw. Widjaja (2003: 165) Otonomi Desa merupakan Otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati Otonomi asli yang dimiliki oleh Desa tersebut.

Deddy S (2002: 16) berpendapat bahwa daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomis, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lain yang memungkinkan daerah tersebut masing – masing berdiri sendiri dan tidak memiliki hubungan hirarki satu sama lainnya.

Sedangkan menurut **Budi B. Siregar (Skripsi Syahwarman, 2008:24)** yang dimaksud dengan Otonomi Desa adalah otoritas yang dimiliki oleh masyarakat Desa untuk menentukan nasib dan mengatur segala urusannya sendiri, termasuk membentuk pemerintahan dan menentukan skema penyelenggaraan kekuasaan lokal, yang kesemuanya itu didasarkan pada kemandirian, partisipasi dan prakarsa masyarakat setempat.

Sebagai wujud penghormatan hak asal usul identitas kedaerahan, maka dikeluarkan kebijakan pemerintah mengenai Otonomi Daerah. kebijakan tersebut memberikan kesempatan pada masyarakat untuk berpartisipasi dalam seluruh proses kebijakan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. kebijakan otonomi memberikan kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi yang berkembang pada masyarakat tersebut.

Upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat daerah sebenarnya telah banyak dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai program pembangunan, antara lain: Dana Pembangunan Desa, Bantuan Inpres Desa Tertinggal, bantuan bibit dan pupuk bagi petani, Kredit Usaha Tani, Kukesra, Takesra, bantuan bergulir ternak sapi dan lain sebagainya. Namun demikian

berbagai program tersebut gagal memberikan kesejahteraan warga masyarakat di daerah (desa).

Menurut Awang (2010 : 77) Otonomi desa adalah kemandirian desa. Kemandirian desa dengan arti kata masalah internal desa, rumah tangganya sendiri, yakni kemampuan mengelola maupun membiayai pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan bertumpu pada hasil sumber daya lokal, swadaya, dan gotong royong masyarakat.

Otonomi tidak bisa dilepaskan dari konteks hubungan pemerintah desa dengan pemerintah tingkat atasnya, sebab desa menjadi bagian integral dari negara yang menjalankan sejumlah kewajiban. Otonomi desa bukan hanya sekedar swadaya masyarakat, tetapi juga persoalan pemerataan dan keadilan hubungan antara pemerintah tingkat atas dengan pemerintah tingkat desa.

2.3.Pengertian Desa

Menurut (Yuliati,2003:24) menyatakan bahwa desa sendiri bersal dari bahasa india yakni “Swadesi” yang berati tempat asal, tempat tinggal, negeri asal atau leluhur yng merujuk pada suatu kesatuan hidup, dengan kesatuan norma, serta memiliki batas wilayah yang jelas.dari defenisi diatas maka kita dapat menemui banyak istilah dinegara kita tentang masyarakat tersebut seperti nagari di masyarakat minag kabau, dusun bagi masyarakat sumatera selatan,dan dati bagi Maluku, masyarakat lain setingkat desa juga memiliki berbagai istilah dan keunikan sendiri baik mata pencaharian maupun adat istiadatnya.

Menurut (**Kansil,2001:21**) desa adalah suatu wilayah yang ditempati penduduk sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam bingkai wialyah Negara kesatuan republic Indonesia(NKRI) yang ditempati sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Tjondronegoro (dalam Ndraha, 2006:554) berpendapat bahwa desa itu buatan belanda. Yang merupakan satuan masyarakat hukum asli menurut sumber ini adalah satuan masyarakat yang di jawa disebut pedukuhan atau yang setingkat.

Menurut **Yuliati (Dalam Skripsi Syahwarman 2008:14)**desa memiliki ciri-ciri yang khas sebagai mana yang di cirikan sebagai berikut:

1. Secara umum :
 - a. Dengan bahasaibu yang kental.
 - b. Tingkat pendidikan yang relatif rendah.
 - c. Mata pencarian yang umumnya disetor pertanian.
2. Secara sosiologis:
 - a. Dengan dua makna positif dan negative
 - b. Makna positif yang melekat di desa antara lain kesamaan dan kejujuran.
 - c. Makna negative sepertin kebodohan dan keterbelakaan.
3. Secara ekonomi:

Dengan komuniti masyarakat yang memiliki model produksi yang khas.

4. Secara hukum dan politik:

Dengan adanya otonomi yang membangun tahta kehidupan desa bagi kepentingan penduduk, yang sebenarnya di ketahui sendiri oleh masyarakat desa bukan pihak luar.

Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Siak No 14 tahun 2007 tentang pedoman penyusunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa

Kewenangan kepala desa adalah :

1. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal- usul.
2. Tugas pembantu dari pemerintah dan pemerintah daerah.
3. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kab/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa.
4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan yang diserahkan kepada desa.

Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Siak No 14 tahun 2007 tentang pedoman penyusunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa bahwa ,pemerintah desa terdiri dari:

1. Kepala Desa dan Perangkat Desa.
2. Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
3. Sekretaris Desa di Pegawai Negri sipil yang memenuhi persyaratan.

Undang-undang nomor 32 tahun 2004 sebagai landan dari peraturan daerah kabupaten siak no 14 tahun 2007, tentang penyusunana organisasi dan tata kerja pemerintahan desa. menegaskan bahwa desa atau yang di sebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang dimiliki batas wilayah yang

berwenag untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan di hormati dalam sistim pemerintahan Negara kesatuan republik Indonesia.

Berdasarkan pengertian diatas sangat jelas bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek kehidupan desa, baik dalam bidang pelayanan public, pengaturan public, dan peberdayaan masyarakat.

2.4. Pengertian Kepala Desa

Desa dipimpin oleh seorang kepala desa yang dipilih oleh penduduk setempat, sedangkan kelurahan dikepalai seorang lurah yang diangkat oleh pejabat berwenang dari pegawai nengri sipil yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undang yang berlaku. Wewenang kepala desa menurut peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 adalah:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa.
- b. Membina kehidupan dan perekonomian masyarakat desa.
- c. Menyusun, mengajukan rancangan APB desa.
- d. Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa bersama BPD.

Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Siak No 14 tahun 2007 tentang pedoman penyusunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa, fungsi Kepala Desa yaitu : Membina masyarakat dan Perekonomian Desa, Memelihara Ketentraman dan Ketertiban, Pelaksanaan Musyawarah Perselisihan Masyarakat, Pembuatan Peraturan Desa. Sebagai Administrator Pembangunan: Yaitu Sebagai Perencanaan, Mengarahkan, Pengambilan Keputusan, Mengkoordinasikan, dan

Pengawasan. Fungsi ini harus dijalankan oleh kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah Desa Muara Bungkal, Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak.

2.5. Konsep Islam Tentang Kepemimpinan

Selain teori diatas, islam juga menawarkan konsep mengenai kepemimpinan untuk memahami dasar konseptual dalam islam paling tidak harus digunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan normatif, historis, dan teoritis (Veithzal Rivai, 2004)

1. Pendekatan normative
2. Dasar konseptual kepemimpinan islam secara normatif, bersumber pada al-Qur'an dan hadis terbagi 4 (empat) pokok yaitu:

- a. Prinsip tanggung jawab dalam organisasi

Dalam islam telah digariskan bahwa setiap diri manusia adalah pemimpin (minimal untuk dirinya sendiri) dan untuk kepemimpinan itu diuntut bertanggung jawab. untuk memahami makna tanggung jawab adalah substansi utama yang harus dipahami terlebih dahulu oleh seorang calon pemimpin, agar amanah yang diserahkan kepadanya tidak disia-siakan.

- b. Fungsi etika tauhid

Kepemimpinan islam dikembangkan diatas prinsip-prinsip etika tauhid. Persyaratan utama seorang pemimpin yang telah digariskan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an surat Al-Imran ayat 118 yakni :

Artinya : *“hai orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaan mu, orang-orang yang di luar*

kepercayaan mu, (karena) mereka tidak henti- hentinya (menimbulkan) kemudahan bagi mu, mereka menyukai apa yang memisahkan mu, telah nyata kebencian dari mulut mereka,dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Sunguh telah kami terangkan pada mu ayat-ayat (kami), jika kamu memahami nya”.

c. Fungsi keadilan

Untuk menjagakan keseimbangan kepentingan,maka azaz keadilan harus benar-benar agar tidak muncul stigma-stigma ketidak adilan seperti kelompok marjinal dan lainnya. Firman allah SWT dalam surat Shaad ayat 26 di bawah ini:

Artinya : “ *hai daud sesungguhnya kami menjadikan kamu khlifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) diantara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu skarena ia akan menyesatkan kamu dari jalan allah akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari penghitung “.*

d. Prinsip kesederhanaan

Rasulullah SAW menegaskan bahwa pemimpin itu harus melayani dan tidak meminta untuk dilayani, sebagaimana sabnanya yang artinya “pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka (**HR.Abu Na’im**)’

3. Pendekatan historis

Al-qur'an begitu kaya dengan kisah-kisah umat islam lalu sebagai pelajaran dan bahan renungan bagi umat yang akan datang.dengan pendekatan historis ini akan lahir pemimpin islam yang memiliki sifat sidiq,amanah,fathonah danlain-lain sebagai syarat keberhsilanya dalam memimpin.

4. Pendekatan teoritis

Idiologi islam adalah idiologi yang terbuka,hal ini mengandung arti walaupun dasar-dasar konseptual yang ada dalam pengembangan idiologi islam sendiri sudah sempurna, namun islam tidak menutup kesempatan mengomunikasikan ide-ide dan pemikiran dari luar islam selama pemikiran tersebut tidak bertentangan dengan alqur'an dan hadist.

2.6.Tugas dan Fungsi Kepala Desa

Berdasarkan peraturan daerah kabupaten siak No 14 tahun 2007 tentang pedoma penyusunana organisasidan tata kerja pemerintahan desa,kepala desa berkedudukan sebagai pelasana penyelenggara pemerintah desa.yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan,urusan pembangunan dan urusan kemasyarakatan.danfungsi kepala desa desa sebagai kepal desa yaitu : Membina masyarakat dan Perekonomian Desa, Memelihara Ketentraman dan Ketertiban, Pelaksanaan Musyawarah Perselisihan Masyarakat desa, Dan Pembuatan Peraturan Desa.Sedangkan Sebagai Administrator Pembangunan: Yaitu Sebagai Perencanaan,Mengarahkan ,Pengambilan Keputusan,Mengkoordinasikan, dan Pengawasan.Fungsi ini harus dijalankan oleh kepala desa dalam pelaksanaan

pembangunan di wilayah desa muara bungkal, kecamatan sungai mandau kabupaten siak.

2.7. Landasan Yuridis Otonomi Desa

Pengembangan otonomi desa merupakan konsekuensi berbagai tuntutan pengembangan lingkungan global, lingkungan pemerintahan, dan lingkungan masyarakat yang dinamis. sebagai sub sistem pemerintahan nasional memerlukan adaptasi dan antisipasi terhadap perkembangan tersebut. hal ini disadari oleh pemerintah sejalan dengan semangat Otonomi Daerah yang telah dilaksanakan. untuk itu kebijakan dan perangkat peraturan sebagai bingkai untuk pengembangan Desa menghadapi berbagai kemungkinan perkembangan dimasa yang akan datang, antara lain:

1. Tap MPR No IV tahun 2000 tentang rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah.
2. UUD 1945 (amandemen ke dua), pasal 18 A dan 18 B
3. UUD No 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional.
4. UUD 32 2004 tentang Pemerintah Daerah.
5. Rancangan pembangunan jangka panjang nasional.
6. Rancangan pembangunan jangka menengah (Perpres No 7 tahun 2005).
7. Rencana pembangunan jangka menengah daerah atau rancangan strategis provinsi dan rencana strategis kabupaten/kota.

2.8.Konsep Operasional

Tabel 2.1. Operasional Variabel Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Mewujudkan Otonomi Desa didesa Muara Bungkal Kabupaten Siak

Konsep Operasional	Indikator	Sub Indikator	Teknik Pengukuran
FungsiKepala Desa Dalam Mewujudkan Otonomoi Desa	1. Melaksanakan pembinaan masyarakat desa.	1.Memberikan pengarahan. 2. Memberikan petunjuk 3.Memberikan saran	Sangat Mampu Mampu Cukup Mampu
	2. Melaksanakan pembinaan perekonomian desa.	1.Memberikan penyuluhan 2.Memberikan bimbingan.	Kurang Mampu Tidak Mampu
	3. Memilihara ketentram-an dan ketertiban dan masyarakat desa.	1.Membentuk satuan keamanan lingkungan. 2.Memilihara keamanan lingkungan	
	4. Melaksana-kan musyawarah penyelesaian perselisihan masyarakat desa.	1.Melaksanakan musyawarah. 2.Memberikan alternatif-alternatif penyalasain mengenai perselisihan masyarakat desa.	
	5. Menyusun dan merancang peraturan peraturan desa dengan persetujuan BPD.	1.Memperhatikan kepentingan masyarakat . 2.Memperhatikan kesejahteraan	
	6. Membuat perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuha desa	1.Perencanaan pembangunan harus sesuai dengan kebutuhan desa 2.Harus menentukan tujuan	

		<p>pembangunannya</p> <p>3. Kepala desa harus menetapkan langkah – langkahnya</p> <p>4. Kepala desa harus tangap dengan aspirasi masyarakat</p>	
	<p>7. Memberi-kan pengarah-an kepada bawahan atau masyara-kat dalam pelaksan-aan pembagu-nan.</p>	<p>1. Mengerakan masyarakat dan aparat desa untuk bekerja sama</p> <p>2. Mengendalikan masyarakat dan aparat desa untuk berkerja sama.</p>	
	<p>8. Mengambil keputusan dalam dalam proses penyelenggaraan pembangunan</p>	<p>1. Mengambil keputusan terbaik.</p> <p>2. Memilih alternative terbaik dalam menetapkan keputusan dalam plaksanaan pembangunan.</p> <p>3. Tegas dalam menetapkan keputusan</p>	
	<p>9. Mengkooor-dinnir penyelenggaraan pembangu-nan</p>	<p>1. Mengkoordinir pelaksanaan tugas pembangunan.</p> <p>2. Pembagian tugas-tugas terhadap pihak terkait.</p>	
	<p>10. Mengawasi semua aktifitas-aktifitas dalam proses penyelenggaraan pembangunan desa.</p>	<p>1. Kepala desa memonitor kegiatan pelaksanaan pembangunan</p> <p>2. Memperbaiki penyimpangan dalam pelaksnaan pembangunan</p>	

2.9 Teknik Pengukuran

Setelah ditemukan konsep-konsep yang bersangkutan dengan penelitian ini, maka penulis menetapkan teknik pengukuran variabel dan indikator variabel, adapun teknik pengukuran :

- 1) Kemampuan dalam melaksanakan pembinaan masyarakat desa. kepala desa memiliki kemampuan dalam membina masyarakat desa dan kelompok masyarakat dengan memberikan pengarahan, petunjuk, dan saran.

Pengukurannya adalah :

Sangat Mampu : Apabila Kepala Desa seringkali memberikan pengarahan, petunjuk, dan saran dalam membina tokoh masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat dan masyarakat desa.

Mampu : Apabila kepala desa mampu memberikan pengarahan, petunjuk, dan saran kepada kelompok masyarakat saja.

Cukup Mampu : Apabila Kepala Desanya mampu memberikan pengarahan dan petunjuk kepada kelompok masyarakat dan tokoh masyarakat saja.

Kurang mampu : Apabila kepala desa dalam memberikan pembinaan masyarakat desa, hanya mengajak kelompok-kelompok masyarakat tertentu saja, tanpa mengajak masyarakat lainnya

Tidak mampu : Apabila Kepala Desa tidak memiliki kemampuan untuk memberikan pengarahan, petunjuk, dan saran kepada masyarakat desa.

- 2) Kemampuan dalam melaksanakan pembinaan perekonomian desa. Kepala desa memiliki kemampuan untuk membina perekonomian desa yang dipimpinnya dengan memberikan penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat di bidang pertanian, perkebunan, dan pembangunan

Pengukurannya adalah:

Sangat Mampu : Apabila kepala desa selalu memberikan penyuluhan dan bimbingan perekonomian kepada kelompok-kelompok dan masyarakat desa di bidang pertanian, perkebunan, dan pembangunan.

Mampu : Apabila kepala desa ikut mendukung dan memberikan bimbingan, perekonomian, tetapi tidak memperhatikan keinginan kelompok-kelompok masyarakat desa dan masyarakat desa.

Cukup Mampu : Apabila kepala desa kurang berperan aktif dalam kegiatan pembinaan perekonomian desa

Kurang Mampu : Apabila kepala desa hanya memberikan pembinaan kepada kelompok-kelompok tertentu saja.

Tidak Mampu : Apabila kepala desa tidak memiliki kemampuan untuk memberikan penyuluhan dan bimbingan perekonomian desa.

3) Kemampuan dalam memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.

Kepala desa memiliki kemampuan dalam memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa dengan membentuk satuan keamanan lingkungan dan mengerakkan masyarakat agar selalu berkerjasama dalam memelihara keamanan lingkungan.

Pengukurannya adalah:

Sangat Mampu : Apabila kepala desa membentuk satuan keamanan lingkungan dengan dan mengerakkan masyarakat agar selalu bekerjasama dalam memelihara keamanan lingkungan.

Mampu : Apabila kepala desa hanya mampu membentuk satuan keamanan lingkungan dan selalu berperan aktif dalam upaya memelihara keamanan lingkungan.

Cukup Mampu : Apabila kepala desa hanya membentuk satuan keamanan saja.

Kurang mampu : Apabila kepala desa hanyamembentuk satuan keamanan lingkungan sementara masyarakat tidak dilibatkan.

Tidak Mampu : Apabila kepala desa tidak membentuk satuan keamanan lingkungan dengan dan mengerakan masyarakat dalam memelihara ketentraman dan ketertiban.

- 4) Kemampuan dalam melaksanakan musyawarah penyelesaian perselisihan masyarakat desa. Kepala desa memiliki kemampuan dalam melaksanakan musyawarah penyelesaian perselisihan masyarakat desa meminta pendapat dari masyarakat dalam melaksanakan musyawarah dan mengambil kebijakan atau keputusan yang adil dan memberikan alternative-alternatif penyelesaian mengenai perselisihan masyarakat desa.

Pengukuranya adalah:

Sangat Mampu : Apabila kepala desa dalam melaksanakan musyawarah selalu meminta pendapat dari masyarakat dan mengambil keputusan yang adil dengan memberikan alternative penyelesaiannya.

Mampu : Apabila kepala desa dalam melaksanakan musyawarah selalu meminta pendapat masyarakat dan megambil keputusan yang adil tetapi kurang teliti dalam musyawarah yang diadakan.

Cukup Mampu : Apabilakepala desa dalam melaksanakan musyawarah selalu meminta pendapat dari masyarakat, tetapi tidak adil dalam pengambilan

keputusan. Sehingga ada pihak yang tertentu yang dirugikan.

Kurang mampu : Apabila kepala desa dalam melaksanakan musyawarah tidak meminta pendapat dari masyarakat desa.

Tidak Mampu : Apabila kepala desa tidak melaksanakan muswarah penyelesaian perselisihan masyarakat.

- 5) Kemampuan dalam menyusun dan merancang peraturan desa dengan persetujuan BPD. Kepala desa memiliki kemampuan dalam menyusun dan merancang peraturan desa haruslah mengacu pada kepentingan masyarakat desa dan pada kesejahteraan masyarakat secara umum serta mengikat pada keseluruhan masyarakat desa dengan melibatkan BPD kepada desa dalam menyusun dan merancang peraturan desa harus mengacu pada kepentingan masyarakat desa, dan pada kesejahteraan secara umum serta mengikat pada keseluruhan masyarakat desa dengan melibatkan BPD dan meminta saran dari masyarakat.

Pengukurannya adalah :

Sangat Mampu : Apabila Kepala Desa dalam menyusun dan merancang peraturan desa dengan mengacu pada kepentingan masyarakat, kesejahteraan masyarakat, dan mengikat pada keseluruhan masyarakat desa dengan melibatkan BPD dan meminta saran dari masyarakat.

Mampu : Apabila kepala desa menyusun dan merancang peraturan desa dengan melibatkan BPD dan meminta saran dari masyarakat.

Cukup Mampu : Apabila kepala desa menyusun dan merancang perturandes dengan melibatkan BPD tetapi tidak meminta saran dari masyarakat.

Kurang mampu : Apabila kepala desa dalam menyusun dan merancang peraturan namun tidak meminta saran dari masyarakat.

Tidak Mampu : Apabila kepala desa tidak mampu dalam membuat dan menyusun serta menyusun serta merancang peratuarn desa.

6) kemampuan dalam membuat perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan

Desanya, kepala desamemiliki kemampuan menentukan tujuan pembangunan,menetapkan langkah langkah dan tangap dengan aspirasi masyarakat dengan melibatkan elemen atau kelompok-kelompok masyarakatdalam merumuskan perencanaan pembangunan.

Pengukuranya adalah :

Sangat Mampu : Apabila Kepala Desa menentukan tujuan, menetapkan langkah-langkah yang akan diambil, tangap terhadap aspirasi masyarakat dengan melibatkan masyarakat dan kelompok- kelompok

yang ada dimasyarakat dalam merumuskan perencanaan pembangunan.

Mampu : Apabila Kepala Desa menentukan tujuan pembangunan, tanggap dengan aspirasi masyarakat dengan melibatkan masyarakat dan kelompok-kelompok dalam merumuskan perencanaan pembangunan.

Cukup Mampu : Apabila kepala desa menentukan tujuan, namun tidak menetapkan langkah-langkah yang akan diambil, dan melibatkan masyarakat dalam merumuskan perencanaan.

Kurang mampu : Apabila kepala desa menentukan tujuan pembangunan, namun tidak melibatkan masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat dalam merumuskan perencanaan.

Tidak mampu : Apabila Kepala Desa tidak menentukan tujuan, tidak menetapkan langkah-langkah yang akan diambil dalam merumuskan perencanaan pembangunan.

- 7) Kemampuan memberikan pengarahan kepada bawahan atau masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, kepala desa memiliki kemampuan pengerakan dan mengendalikan masyarakat dan aparat desa untuk selalu berkerja sama dalam pelaksanaan pembangunan.

Pengukurannya adalah:

- Sangat Mampu : Apabila kepala desa mampu mengerakan dan mengendalikan masyarakat untuk selalu berkerja sama dalam pelaksanaan pembangunan.
- Mampu : Apabila kepala desa mampu mengerakan dan mengendalikan masyarakat dan aparat desa dalam pelaksanaan pembangunan.
- Cukup Mampu : Apabila kepala desahanya mampu mengerakan dan mengendalikan masyarakat dan Aparat Desadalam pelaksanaan pembangunan.
- Kurang Mampu : Apabila kepala desa kepala desa hanya mampu mengerakan dan mengendalikan aparat desa saja.
- Tidak Mampu : Apabila kepala desa tidak memiliki kemampuan untuk mengerakan masyarakat dan aparat desa dalam pelaksanaan pembangunan desa.
- 8) Kemampuan mengambil keputusan dalam proses penyelenggaraan pembangunan. Kepala desa mampu mengambil keputusan dan memilih alternative terbaik serta alternatif yang terbaik bagi masyarakat dan kelompok-kelompok yang ada didesa dan tegas dalam menetapkan keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan desa.
- Pengukurannya adalah :
- Sangat Mampu : Apabila kepala desa mampu mengambil kepusan dan memberikan alternatif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada didesa serta tegas dengan keputusan yang telah diambil.

- Mampu : Apabila kepala desa mampu mengambil keputusan dan memberikan alternative-alternatif terbaik bagi masyarakat dan kelompok-kelompok yang ada didesa
- Cukup mampu : Apabila kepala desa memiliki kemampuan dalam mengambil keputusan dan memberikan alternatif,tetapi kurang memiliki ketegesan.
- Kurang mampu : Apabila kepala desa kurang memiliki kemampuan dalam mengambil keputusan dan memberikan alternatif serta tidak memiliki ketegasan.
- Tidak Mampu : Apabila kepala desa tidak memiliki ketegasan dengan keputusan yang telah diambil dan kurang bisa memilih alternatif yang baik bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.
- 9) Kemampuan mengkoordinir penyelenggaraan pembangunan desa.kepala desa memiliki kemampuan dalam mengkoordinir pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan program pembanguna,dengan memebentuk kelompok – kelompok, melakukan pembangian tugas terhadap pihak-pihak terkait (aparat desa, pemuka masyarakat, dan masyarakat desa.)
- Pengukuranya adalah:
- Sangat Mampu : Apa bila kepala desa membentuk kelompok-kelompok, melakukan pembagian tugas terhadap masyarakat dan aparat desa,pemuka masyarakat,dan masyarakat desa.

Mampu : Apabila kepala desa membentuk membentuk kelompok-kelompok, melakukan pembagian tugas terhadap aparat desa dan pemuka masyarakat saja.

Cukup mampu : Apabila kepala desa mengkoordinir pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan program pembangunan dan membentuk kelompok-kelompok pembagian tugas kepada aparat desa saja dan selalu berkerjasama dan saling bertanggung jawaban antara kepala desa dengan masyarakat.

Kurang Mampu : Apabila kepala desa melakukan pembagian tugas terhadap aparat desa dan pemuka masyarakat, dan masyarakat dan kepala desa kurang dipertanggung jawabkan.

Tidak Mampu : Apabila kepala desa tidak melakukan pembagian tugas, dan juga tidak membentuk kelompok-kelompok masyarakat.

10) Kemampuan mengawasi aktifitas-aktifitas dalam proses penyelenggaraan pembangunan desa. kepala desa memiliki kemampuan memonitor kegiatan pelaksanaan pembangunan, dan perbaiki penyimpangan

Pengukurannya adalah :

Sangat Mampu : Apabila Kepala Desa memonitor kegiatan pelaksanaan pembangunan dan memperbaiki penyimpangan.

Mampu : Apabila kepala desa mengawasi dan memonitor kegiatan pembangunan dan segera memperbaiki penyimpangan yang terjadi

Kurang Mampu : Apabila kepala desa mengawasi dan memonitor kegiatan pelaksanaan pembangunan, namun kepala desa kurang tangap atau teliti dengan penyimpangan yang terjadi di lokasi pembangunan dan tidak memberikan sanksi yang tegas terhadap aparat desa atau aparat desa yang melakukan penyimpangan.

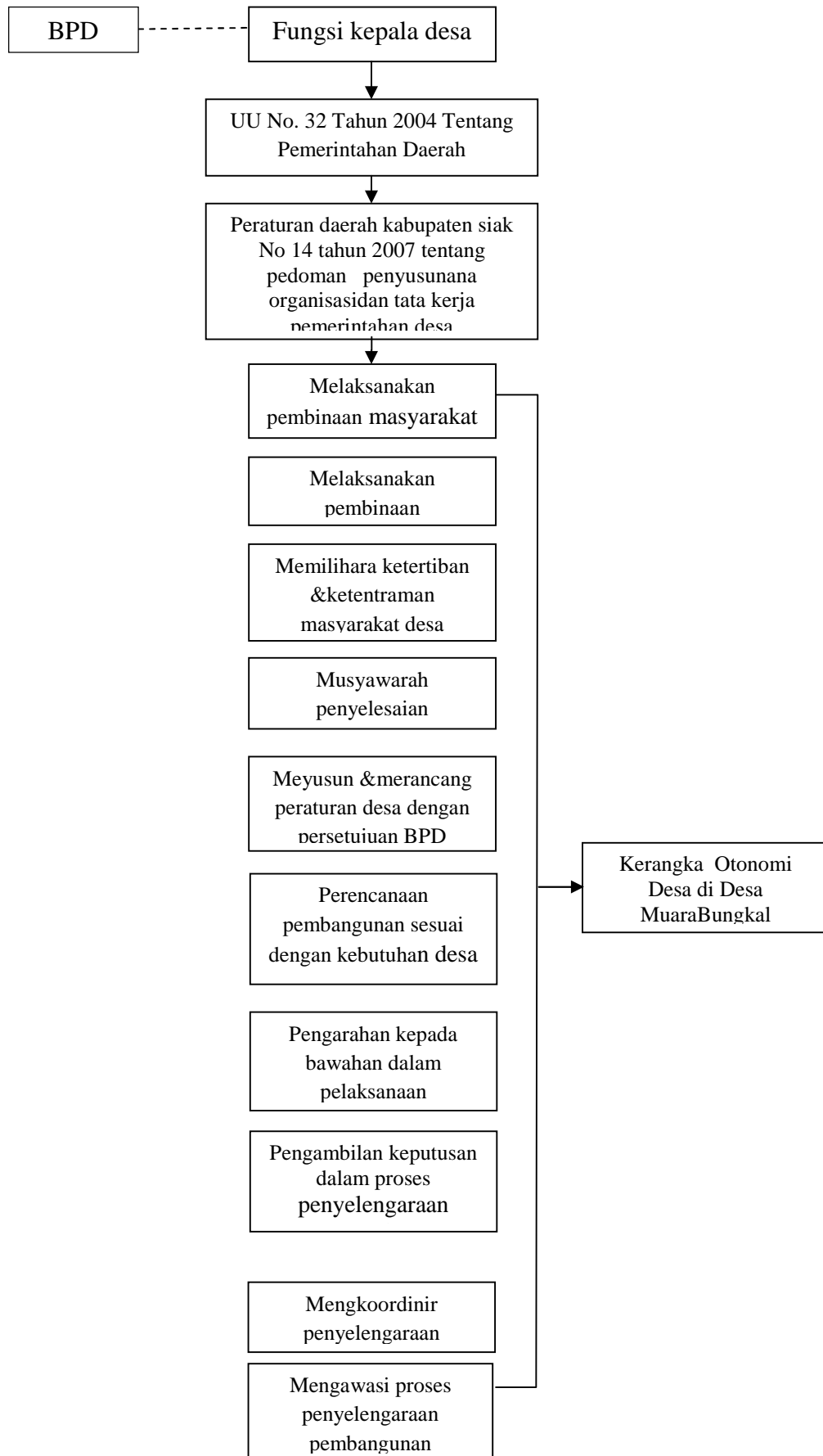
Kurang Mampu : Apabila kepala desa memonitor kegiatan pembangunan tetapi tidak memperbaiki penyimpangan.

Tidak Mampu : Apabila kepala desa tidak memonitor kegiatan pembangunan dan tidak memperbaiki penyimpangan.

2.10 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan teori yang telah diuraikan dalam tinjauan pustaka diatas, maka dapat dilihat bagan dari kerangka pemikiran dari penelitian ini, sebagai berikut :

Gambar : 2.1 Kerangka pemikiran : Analisis Fungsi Kepala Desa Dalam Mewujudkan Otonomi Desa Di Desa Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi Desa Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak. Waktu penelitian ini dilakukan pada tanggal 20 April 2011 sampai dengan 31 Mei 2011. Dalam penelitian ini penulis akan berusaha menggambarkan keadaan lokasi di sertai analisa penelitian tentang fungsi Kepala Desa, di Desa Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak.

1.2. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek yang akan atau ingin diteliti. Sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Random Sampling yakni teknik penentuan sampel dengan cara mengambil dari semua anggota populasi dilakukan dengan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam anggota populasi (**sugiono: 2007: 59**)

Adapun yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah terdiri dari dua unsur, yaitu :

1. Unsur Aparatur Pemerintahan Desa

Dari aparatur pemerintahan desa, yang menjadi populasi adalah aparat pemerintahan desa yang berjumlah 6 orang yang terdiri dari 1 orang kepala desa, 1 orang ketua BPD dan 4 orang dari aparatur pemerintah lainnya. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel III.1. Jumlah Responden Berdasarkan Unsur Aparat Pemerintah Desa di Desa Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak.

No	Jenis Populasi	Jumlah		Persentase (%)
		Populasi	Sampel	
1	Kepala Desa	1	1	100
2	Ketua BPD	1	1	100
3	Sekretari desa	1	1	100
4	Kepala urusan pembangunan	1	1	100
5	Kepala urusan pemerintahan	1	1	100
6	Kepala urusan kesejahteraan Rakyat/umum	1	1	100
Jumlah		6	6	100

2. Unsur Masyarakat

Dari unit masyarakat desa yang menjadi populasi adalah seluruh jumlah masyarakat desa yang berjumlah 140 KK. Untuk mempermudah dalam pengumpulan data ini, maka jumlah populasi yang dijadikan responden dari unsur masyarakat yang dipersentasekan dengan menggunakan rumus slovin berjumlah 58 KK.

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{140}{1 + 140(0,01)}$$

$$n = \frac{140}{1 + 1,4}$$

$$n = \frac{140}{2,4}$$

$$n = 58,33.$$

Dalam pembulatan bilangan pecahan ada empat metode, yang pertama jika pecahan yang akan di bulatkan $< 0,05$ atau $0,005$ atau $0,0005$

dan seterusnya maka pecahan tersebut dihilangkan contoh : 64,543 dibulatkan menjadi 64,54, yang kedua jika pecahan yang akan dibulatkan itu $> 0,05$ dan seterusnya maka pecahan tersebut dibulatkan jadi 1 contoh : 64,548 dibulatkan menjadi 64,55. Yang ketiga jika pecahan yang akan dibulatkan itu $= 0,05$ dan seterusnya maka pecahan tersebut dibulatkan menjadi 1 untuk bilangan sebelumnya ganjil contoh : 63,50 menjadi 64 yang ke empat jika pecahan yang akan di bulatkan itu $= 0,05$ dan seterusnya maka pecahan tersebut dihilangkan untuk bilangan sebelumnya genap contoh: 64,500 dibulatkan menjadi 64. **(Husaini Usman,11 2006)**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pembulatan bilangan yang pertama seperti yang tertera diatas maka sampel yang akan di ambil 58 orang dari 140 KK.

1.3. Jenis dan Sumber Data

a. Data primer

Yaitu data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan penyebaran quisioner dengan responden tentang pendapatnya atau tanggapannya yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atas pembangunan, dan keberhasilan atas pelaksanaan pembangunan tersebut.

b. Data sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari aparat desa yang berkaitan dengan penelitian ini, data tersebut antara lain: jumlah penduduk, keadaan geografis, tingkat pendidikan, mata pencaharian dan luas wilayah.

1.4. Teknik Pengambilan Data

Dalam pelaksanaan penelitian ini digunakan beberapa pengumpulan data yaitu :

a. Quesioner

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menyusun daftar pertanyaan untuk mendapatkan data tentang pelaksanaan fungsi kepala desa dalam mewujudkan otonomi desa, adapun yang menjadi questioner adalah masyarakat desa Muara Bungka yang berjumlah 58 orang yang penulis jadikan sampel. Kegunaan dari Quesioner adalah untuk mendapatkan bahan/data yang akurat dalam penelitian.

b. Wawancara

Yaitu tanya jawab langsung dengan responden untuk memperoleh data atau informasi yang relevan dengan penelitian, ini dimana dilakukan dengan tatap muka. Wawancara ini akan dilakukan dengan beberapa Aparat Desa, Muara Bungkal, Kecamatan Sungai Mandau, Kabupaten Siak.

1.5. Teknik Analisa Data

Setelah semua data yang dikumpulkan melalui metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini, selanjutnya data dikelompokkan dan diolah menurut jenisnya, setelah itu dianalisa secara deskriptif, yaitu suatu analisa yang berusaha memberikan gambaran terperinci berdasarkan kenyataan di lapangan dan hasilnya akan disajikan dalam bentuk tabel dan dilengkapi dengan uraian-uraian serta keterangan yang mendukung untuk dapat diambil kesimpulan.

Data yang diperoleh dari angket akan diamati dengan menggunakan rumus sebagai berikut (**Anas Sudijono, 2007:43**)

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

p = Persentase

f = Frekuensi

N = Jumlah responden

Adapun Pengukuran terhadap variabel penelitian dan indikator penelitian ini menggunakan lima alternative jawaban yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut (**Husaini Usman, 2009:146**)

Sangat Mampu : 81% - 100%

Mampu : 61 – 80%

Cukup Mampu : 41% – 60%

Kurang Mampu : 21% - 40%

Tidak Mampu : 0 - 21%

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI

1.1 Keadaan Geografis

Desa Muara Bungkal merupakan desa yang terletak di hulu sungai mandau yang termasuk kedalam wilayah kecamatan sungai Mandau .secara geografis desa Muara Bungkal berbatasan,sebelah utara berbatasan dengan Desa Becah Umbai,sebelah timur desa Muara Kelantan dan Sungai Selodang, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Tualang,dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Minas.

Desa Muara Bungkal memiliki luas wilayah lebih kurang 20.000 Ha yang terdiri dari daerah rawa dan daerah perbukitan serta banyak dilalui sungai besar dan kecil,struktur tanah di wilayah desa Muara Bungkal di domisili oleh bentuk sturuktur, butiran yang merupakan campuran butiran-butiran primer yang kasar tanpa adanya bahan pengikat angreget dengan porosities tanah adalah tinggi artinya kaya pori-pori mikro dan mudah merebes air dan sebaliknya air mudah mengering.Sebagian kecil ada juga jenis tanah gambut namun dari golongan gambut dangkal yang masih memiliki potensi tinnggi untuk di Tanami kelapa sawit.

Tektur tanah merupakan perbandingan kandungan freksi pasir. Debu dan liat dalam suatu masa tanah, tektur tanah didesa Muara Bungkal termasuk pada kelas tektur liat berpasir dengan memperhatikan kandungan liat antara 35-55% kandungan debu antara 0-20% dan kandungan pasir 20-25 % sedangkan sebagian

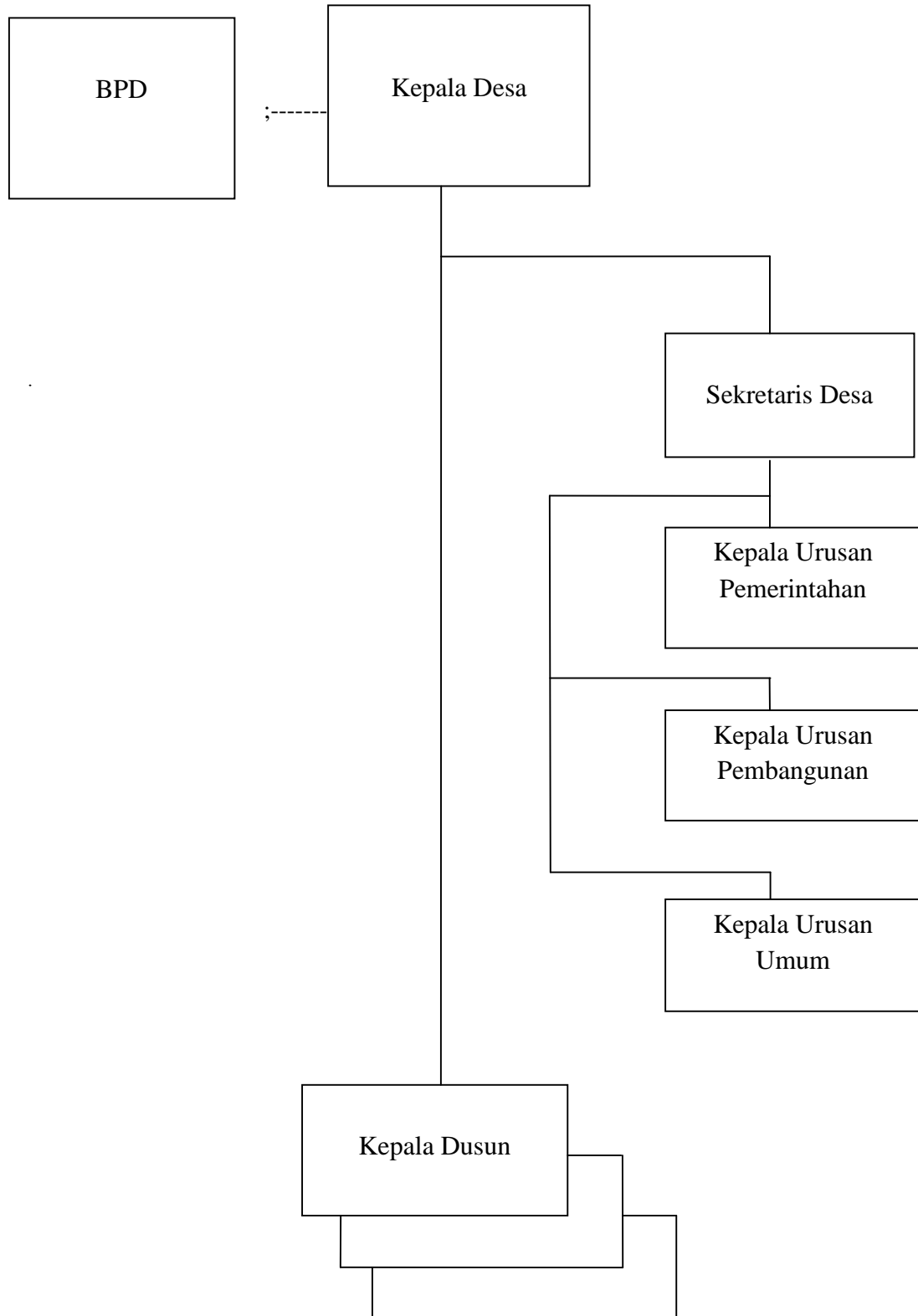
kecil tanah gambut yang ada di desa Muara Bungkal merupakan tanah yang kaya dengan bahan organik tapi daya tahan terhadap pengikat air sangat rendah, sehingga tingkat keasamannya cukup tinggi.

1.2 Pemerintah

Pemerintah desa Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak, tidak jauh berbeda dengan desa-desa lainnya. Dalam struktur perangkat desa, pemerintah desa Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak dipimpin oleh seorang kepala desa yang di tunjuk melalui proses pemilihan kepala desa (pilkadeas) langsung dengan sistim demokrasi dan mengutamakan pemilihan putra terbaik dari desa dan memahami tentang pemerintah desa. BPD bertugas sebagai pengawas dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh kepala desa, dan BPD bertugas merumuskan peraturan desa (PERDES) bersama kepala desa. Kepala desa dalam melaksanakan tugas nya dibantu oleh seorang sekretaris desa yang mewakili kepala desa dalam mengkoordinir tugas-tugas yang akan dilaksanakan oleh kepala desa. Untuk mempermudah pelaksanaan administrasi di desa Muara Bungkal di bantu oleh beberapa kepala urusan yaitu: kepala urusan pemerintah, kepala urusan pembangunan, dan kepala urusan umum.

Secara keseluruhan aparat pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dibuat dalam sebuah struktur seperti dibawah ini:

**Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Muara Bungkal
Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak**



1.3 Biografi Kepala Desa

Asril Amran, saya berasal dari Muara Bungkal, lahir 05 mei 1975 di desa muara bungkal, merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan amran, dan wan tau'idah jenjang pendidikan yang telah di ditempuh sebagai berikut :

Menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negri Sungai Mandau, kabupaten siak,tahun 1987

Menyelesaikan pendikdikan menengah pertama di SMP Negri 1 kecamatan mandau kabupaten bengkalis, pada tahun 1991

Menjabat sebagai kepala desa, di desa muara bungkal kecamatan sungai mandau kabupaten siak pada tahun 2008, masa jabatan selama lima tahun.

1.4 Keadaan Penduduk

Berdasarkan data yang diperoleh di kantor desa Muara Bungkal bulan April Tahun 2012 tercatat jumlah penduduk di desa Muara Bungkal adalah 644 jiwa, yang terdiri dari 334 jiwa laki-laki dan 310 jiwa perempuan dengan 140 kepala keluarga (kk) penduduk desa Muara Bunkal di dominansi oleh suku melayu,hampir 90%. Dari jumlah penduduk, disamping itu di jumpai etnis jawa,batak, minag dan lain-lain bahasa yang digunakan adalah bahasa ibu dari etnis tersebut yang di ajak lawan bicara ,namun kebanyakan digunakan bahasa melayu setempat.

Untuk mengetahui jumlah penduduk perdusun didesa Muara Bungkal dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel IV. 1 : Jumlah penduduk perdusun desa Muara Bungkal

NO	Dusun	Jumlah (jiwa)
1.	Dusun Pangkalan Cacing	318
2.	Dusun Bak Bakbido	214
3.	Dusun Bakung Begendang	110
Jumlah		644

Sumber : Dokumen Monografi Muara Bungkal, 2012

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah keseluruhan penduduk di desa Muara Bungkal adalah tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah keseluruhan penduduk di desa Muara Bungkal adalah 644 jiwa.

1.5 Mata Pencarian

Desa Muara Bungkal pada uraian sebelumnya adalah meruapakan daerah yang dialiri sungai mandau yang merupakan daera yang kaya akan hasil seperti, ikan,udang dan lain-lain.

Di tinjau dari mata pencariia penduduk desa Muara Bungkal pada umumnya adalah nelayan, toke, pedagang, peternak,pengeraji, guru,jasa PNS/swasta.untuk lebi jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel IV.2 : Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian di desa Muara Bungkal,Kecamatan Sungai Mandau, Kabupaten Siak.

No	Mata Pencaarian	Jumlah (Jiwa)
1.	Tani/Pekebun	378
2.	Nelayan/Peternak	28
3.	Guru	10
4.	Swasta	25
5.	Tidak Bekerja	203
Jumlah		644

Sumber : Dokumen Monografi desa Muara Bungkal, 2012

1.6 Kehidupan Sosial Keagamaan

Memeluk agama merupakan hak asasi dasar bagi manusia. Kebebasan beragama di Negara kesatuan republic Indonesia dijamin dalam batang tubuh UUD 1945 pada pasal 29. sikap yang perlu di kembangkan dari pasal 29 UUD 1945 tersebut adalah toleransi antar umat beragama, kerukunan antar umat beragama dan tidak mencampur adukan kepercayaan.

Mayoritas agama penduduk Muara Bungkal adalah beragama Islam. Untuk menjalankan perintah agama tentu sangat diperlukan tempat ibadah. Dimana tempat ibadah ini selain untuk tempat ibadah juga merupakan salah satu saluran penting untuk mengkomunikasikan kegiatan-kegiatan agama.

Banyaknya tempat peribadatan di desa Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tab. IV.3 : Jumlah sarana Ibadah di desa Muara Bungkal.

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1.	Misjid	3
2.	Mushollah	2
Jumlah		5

Sumber: Dokumen Monografi desa Muara Bungkal, 2012

1.7 Pendidikan

Salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan suatu daerah adalah tingkat pendidikan yang dimiliki masyarakat setempat. Semakin tinggi pendidikan suatu masyarakat maka makin mudah dan cepat mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi, sebaliknya apabila tingkat pendidikannya rendah maka akan dapat menghambat laju perkembangan suatu daerah.

Menurut **sofian**(1998) pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan keberhasilan pembangunan suatu daerah, karena semakin tinggi tinggi pendidikan masyarakat suatu daerah maka semakin mudah untuk menerima atau menerapkan masuka- masukan yang sifatnya membangun.untuk menunjang keberhasilan pendidikan tersebut perlu adanya sarana dan prasarana yang memadai.dalam hal ini prasarana pendidikan yang ada di desa Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak adalah berupa sekolah dasar (SD) sebanyak satu unit, dan sekolah menengah lanjut pertama (SMP) sebanyak satu unit.

Banyaknya tempat peribadatan di desa Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1.	SD	1
2.	SMP	1
Jumlah		2

Sumber: Dokumen Monografi desa Muara Bungkal,2012

BAB V

ANALISA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

5.1. Identitas Responden

Identitas responden bermanfaat dalam suatu penelitian, guna mengetahui latar belakang responden antara lain mengenai tingkat pendidikan, golongan umur atau usia jenis kelamin dan sebagainya. Untuk itu dalam penelitian ini penulis harus mengemukakan identitas respondendilihat dari:

5.1.1. Tingkat Pendidikan

Adapun tingkat pendidikan responden pada penelitian ini dapat di ketahui pada tabel di bawah ini:

Tabel V.1 : Tingkat pendidikan responden masyarakat Desa Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak.

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Tamat SD	6	10,34%
2.	Tamat SMP	19	32,76%
3.	Tamat SMA	25	43,10%
4.	Tamat sarjana (S1)	8	13,79%
Jumlah		58	100%

Sumber data : hasil penelitian lapangan 2012

Dari tabel diatas dapat diketahui tingkat pendidikan responden di desa Muara Bungkal, dimana yang paling banyak adalah responden yang memiliki tingkat pendidikan SMA yakni sebanyak 25 orang atau 43,10 %, selanjutnya tamat SMP sebanyak 19 orang atau 32,76%, tamat SD sebanyak 6 orang atau 10,34%, dan tamat Sarjana ada 8 orang atau 13,79% keadaan ini sesuai dengan kenyataan masyarakat

desa, sampel dimana sebagian besar masyarakatnya hanya sampai tamatan SMA, dan tamatan S1) hanya 8 orang.

5.1.2. Golongan Umur atau Usia

Adapun golongan umur atau usia responden pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.2 : Golongan umur atau usia responden masyarakat Desa Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak.

No	Golongan Umur/Usia	Jumlah	Persentase(%)
1.	20-30 Tahun	5	8,62 %
2.	30-40 Tahun	30	51,72 %
3.	40-50 Tahun	20	34,48 %
4.	50-60 Tahun	3	5,17 %
Jumlah		58	100%

Sumber data: hasil penelitian lapangan, 2012

Dari tabel diatas dapat diketahui golongan umur atau usia responden pada penelitian ini lebih banyak adalah responden yang memiliki umur atau usia 30-40 Tahun yaitu 30 responden (51,72%) karena menurut penulis pada usia ini seseorang bisa memberikan saran dan ide –ide yang lebih segar dan lebih bijaksana, selebihnya responden yang memiliki golongan umur atau usia 40-50 Tahun sebanyak 20 responden (34,48%), selanjutnya golongan umur atau usia 20-30 Tahun sebanyak 5 orang (8,62%), dan golongan umur 50-60 Tahun sebanyak 3 orang atau (5,17%),.

Golongan umur atau usia 50-60 tahun jumlahnya sangat sedikit karena menurut penulis pada golongan usia ini banyak tidak aktif lagi dalam setiap kegiatan kemasyarakatan dan kurang berpartisipasi dalam pembangunan desa.

5.1.3. Jenis Kelamin

Jenis kelamin responden pada penelitian ini dapat diketahui pada tabel dibawah ini:

Tabel V. 3 : Jenis kelamin responden desa Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak.

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1.	Laki-laki	45	77,59 %
2.	Perempuan	13	22,41 %
	Jumlah	58	100%

Sumber data : hasil penelitian lapangan,2012

Dari tabel diatas dapat diketahui jenis kelamin responden didesa Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak, yang paling banyak adalah responden yang memiliki jenis kelamin laki-laki sebanyak 45 orang atau (77,59%), dan selebihnya responden jenis kelamin perempuan sebanyak 13 orang atau (22,41%), Alasan penulis lebih banyak mengambil sampel jenis laki-laki adalah lebih mudah dalam meminta informasi atau keterangan mengenai penelitian dan pada umumnya mereka mudah untuk dijumpai diluar rumah, sedangkan kaum perempuan juga sulit untuk dimintai keterangan informasi dan mereka sulit untuk di temui karena pada siang hari mereka pada umumnya pergi ke kebun pada sore hingga malam mereka sibuk megurus anak serta rumah tangga mereka, itulah sebabnya susah untuk diminta keterangan dan informasi.

5.2 Hasil Penelitian

5.2.1. Kemampuan Kepala Desa Dalam Melaksanakan Pembinaan Masyarakat Desa

Kemampuan kepala desa dalam melaksanakan pembinaan masyarakat desa dapat dilakukan kepala desa dengan memberikan pengarahan, petunjuk, dan pelatihan teknis tentang pedesaan.

Adapun gambaran yang jelas tentang kemampuan kepala desa dalam memberikan pengarahan, petunjuk serta saran dalam membina masyarakat desa, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.4 : Tangapan Responden, Tentang Kemampuan Kepala Desa Dalam Memberikan Pengarahan Kepada Masyarakat

No	Alternatif Jawaban	Jumlah responden	Persentase (%)
1	Sangat mampu	2	3,45 %
2	Mampu	6	10,34 %
3	Cukup mampu	35	60,34 %
4	Kurang mampu	8	13,79 %
5	Tidak mampu	7	12,07%
Jumlah		58	100%

Sumber data: hasil penelitian 2012

Dari tabel V.4 diatas dari 58 responden, menyatakan kemampuan kepala desa, dalam memberikan pengarahan kepada masyarakat desa, yang menyatakan *sangat mampu* sebanyak 3 responden atau 3,45% *mampu* sebanyak 6 responden atau 10,34%, *cukup mampu* sebanyak 35 responden atau 60,34% *kurang mampu* sebanyak 8 responden atau 13,79% *tidak mampu* 7 responden atau 12,07%

Tabel V.5 : Tangapan Responden Tentang,Kemampuan Kepala Desa Dalam Memberikan Petunjuk Kepada Masyarakat.

No	Alternatif Jawaban	Jumlah responden	Persentase (%)
1	Sangat mampu	-	-
2	Mampu	8	13,79%
3	Cukup mampu.	10	17,24%
4	Kurang mampu.	31	53,45 %
5	Tidak mampu.	9	15,52 %
Jumlah		58	100%

Sumber data : hasil penelitian lapangan,2012

Dari tabel V.5 diatas dari 58 responden, menyatakanKemampuan Kepala Desa Dalam Memberikan Petunjuk Kepada Masyarakat desa,yang menyatakan *sangat mampu* sebanyak 0 responden atau 0.00%, *mampu* sebanyak 8 responden atau 13,79%, *cukup mampu* sebanyak 10 responden atau 17,24% *kurang mampu* sebanyak 31 responden atau 53,45% *tidak mampu* 9 responden atau 15,52%.

Tabel V.6 : Tangapan Responden Tentang, Kemampuan Kepala Desa Dalam Memberikan Saran Kepada Masyarakat

No	Alternatif Jawaban	Jumlah responden	Persentase (%)
1	Sangat mampu.	-	-
2	mampu.	8	13,79 %
3	Cukup mampu.	35	60,34 %
4	Kurang mampu.	10	17,24%
5	Tidak mampu.	5	8,62 %
Jumlah		58	100%

Sumber data : hasil penelitian lapangan,2012

Dari tabel V.4 diatas dari 58 responden,menyatakan kemampuan kepala desa, dalam memberikan pengarahan kepada masyarakat desa, yang menyatakan *sangat mampu* sebanyak

0 responden atau 0,00%, *mampu* sebanyak 8 responden atau 13,79%,
cukup mampu sebanyak 35 responden atau 60,34% *kurang mampu*
 sebanyak 10 responden atau 17,24% *tidak mampu* 5 responden atau
 8,62%.

Tabel V.7 : Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Fungsi Kepala Desa Dalam Melaksanakan Pembinaan Masyarakat Desa. di Desa Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak.

Sub Indikator	Kategori Jawaban										N	%
	Sangat mampu		Mampu		Cukup mampu		Kurang mampu		Tidak mampu			
	f	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
Memberikan pengarahan.dalam membina tokoh masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakata desa	2	3,45	6	10,34	35	60,34	8	13,79	7	12,07	58	100
Memberikan petunjuk dalam membina tokoh masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat desa	0	0	8	13,19	10	17,24	31	53,45	9	15,51	58	100
Memberikan saran dalam membina tokoh masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat desa	0	0	8	13,79	35	27,58	10	17,24	5	8,62	58	100
JUMLAH	2	1.15	22	12.64	74	42.53	49	28.16	21	12.07	174	100

Sumber data :hasil penelitian lapangan 2012.

Dari tabel rekapitulasi diatas dapat diketahui bahwa pada masing- masing pernyataan positif yang penulis ajukan sebagai bahan angket untuk mengetahui tanggapan responden mengenai kemampuan kepala desa dalam Dalam Melaksanakan Pembinaan Masyarakat Desa di Desa Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak, yang menjawab pada alternatif jawaban pada kategori “Sangat Mampu” sebanyak 2 orang responden atau 1,15%, ini berarti bahwa

kepala desa telah melakukan pembinaan, tanggapan responden pada kategori “Mampu” sebanyak 22 orang responden atau 12,64 %, yaitu dalam pembinaan masyarakat desa, kepala desa terlebih dahulu menjelaskan tujuan dari diadakannya pembinaan tersebut, tanggapan responden pada kategori “Cukup Mampu” sebanyak 74 orang responden atau 42,53%, ini berarti kepala desa melakukan pembinaan namun hanya kelompok-kelompok masyarakat saja yang terlibat dalam pelaksanaan pembinaan tersebut, dan tanggapan pada kategori “Kurang Mampu” sebanyak 49 orang responden atau 28,16 % dikarenakan kepala desa memang memberikan pembinaan namun dalam program ini beliau kurang berperan aktif , karena beliau hanya memberikan pembinaan tetapi pelaksanaannya berjalan kurang baik, sedangkan tanggapan responden pada kategori “Tidak Mampu” sebanyak 21 orang atau 12,07%. Yang mengatkan bahwa kepala desa belum memberikan pembinaan kepada masyarakat.

Menurut uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi kepala desa dalam melaksanakan pembinaan masyarakat desa di desa muara bungkal berjalan dengan cukup baik hal ini dapat dilihat pada tabel V.7. yang ternyata kebanyakann responden 42,53% menjawab Cukup Mampu terhadap pelaksanaan fungsi kepala desa dalam membina masyarakat desa Muara Bungkal.

Ini dapat disesuaikan dengan wawancara yang dilakukan penulis dengan kepala desa pada April 2011 beliau mengatakan :

“kegiatan pembinaan masyarakat desa dilaksanakan dalam rangka membina masyarakat kearah yang lebih baik dan mencapai kesejahteraan masyarakat desa. Sebelum pembinaan masyarakat desa dilaksanakan, terlebih dahulu saya menjelaskan kepada masyarakat tujuan dari pembinaan tersebut , kemudian memberikan pengarahan, serta petunjuknya.”

Jawaban Cukup Mampu lebih dominan dikarenakan kepala desa menjelaskan diadakannya tujuan diadakannya pembinaan tersebut dan melibatkan anggota masyarakat dalam pelaksanaannya, tetapi dalam pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan kepala desa tidak melakukan pemantauan menyeluruh terhadap kegiatan tersebut .

5.2.2. Kemampuan Kepala Desa Dalam Melaksanakan Pembinaan Perekonomian Desa

Bidang ekonomi merupakan sektor yang paling berperan dalam setiap kehidupan masyarakat desa, kepala desa diharapkan mampu melaksanakan pembinaan perekonomian desa yang dipimpinnya karena dialah motor penggerak perekonomian masyarakat desa. Pembinaan perekonomian desa merupakan kegiatan penyuluhan dan bimbingan masyarakat pada sektor pertanian, perkebunan, dan pembangunan.

Adapun gambaran yang jelas tentang kemampuan kepala desa dalam membina perekonomian desa dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.8 : Tangapan Responden TentangKemampuan Kepala Desa Dalam Memberikan penyuluhan Kepada Msyarakat di bidang pertanian perkebunan,dan pembangunan.

No	Alternatif Jawaban	Jumlah responden	Persentase (%)
1	Sangat mampu.	2	3,45 %
2	Mampu	11	18,97%
3	Cukup Mampu	20	34,48 %
4	Kurang Mampu	25	43,10 %
5	Tidak Mampu	0	0%
Jumlah		58	100%

Sumber data : hasil penelitian lapangan,2012

Dari tabel V.4 diatas dari 58 responden,menyatakan kemampuan kepala desa, dalam Memberikan penyuluhan kepada masyarakat desa dibidang pertanian, perkebunan, dan pembangunan, yang menyatakan *sangat mampu* sebanyak 2 responden atau 3,45%, *mampu* sebanyak 11 responden atau 18,97%, *cukup mampu* sebanyak 20 responden atau 34,48% *kurang mampu* sebanyak 25 responden atau 43,10% *tidak mampu* 0 responden atau 0,00%

Tabel V.9 : Tangapan Responden Tentang Kemampuan Kepala Desa Dalam Memberikan bimbingan Kepada Msyarakat di bidang pertanian perkebunan,dan pembangunan

No	Alternatif Jawaban	Jumlah responden	Persentase (%)
1	Sangat mampu	1	1,72%
2	Mampu	10	17,24%
3	Cukup Mampu.	26	44,83%
4	Kurang Mampu	15	25,86%
5	Tidak Mampu	6	10,34%
Jumlah		58	100%

Sumber data : hasil penelitian lapangan,2012

Dari tabel V.4 diatas dari 58 responden,menyatakan kemampuan kepala desa, dalam Memberikan bimbigan kepada

masyarakat desadi bidang pertanian, perkebunan,dan pembangunan, yang menyatakan *sangat mampu* sebanyak 1 responden atau 1,72%, *mampu* sebanyak 10 responden atau 17,24%, *cukup mampu* sebanyak 26 responden atau 44,83% *kurang mampu* sebanyak 15 responden atau 25,86% *tidak mampu* 6 responden atau 10,34%

Tabel V.10 :Rekapitulasi Tangapan Responden Tentang Pembinaan perekonomian Desa,Kemampuan Kepala Desa Dalam Memberikan penyuluhan Kepada Masyarakat di bidang pertanian perkebunan, dan pembangunan

Sub Indikator	Kategori Jawaban										N	%
	Sangat mampu		mampu		Cukup mampu		Kurang mampu		Tidak mampu			
	F	%	F	%	F	%	F	%	f	%		
Memberikan arahan.dalam membina tokoh masyarakat atau kelompok-kelompok masyaraka desa	2	3,45	11	18,97	20	34,48	25	43,10	0	0	58	100
Memberikan petunjuk dalam membina tokoh masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat desa	1	1,72	10	17,24	26	44,83	15	25,86	6	10,34	58	100
JUMLAH	3	2,59	21	18,10	46	39,66	40	34,48	6	5,17	116	100

Sumber data : hasil penelitian lapangan,2012

Dari tabel rekapitulasi diatas dapat diketahui bahwa pada masing-masing pernyataan positif yang penulis ajukan sebagai bahan angket untuk mengetahui tangapan responden kemampuan kepala desa dalam melakukan pembinaan perekonomian desa di Desa Muara

Bungkal Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak, yang menjawab pada alternatif jawaban pada kategori “sangat mampu” sebanyak 3 orang responden atau 2,59%, ini berarti bahwa kepala desa telah melakukan pembinaan perekonomian masyarakat desa. Tangapan responden pada kategori “Mampu” sebanyak 21 orang responden atau 18,10%, dikatakan mampu karena pembinaan yang dilakukan kepala desa cukup menyentuh dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Tangapan responden pada kategori “Cukup Mampu” sebanyak 46 orang responden atau 39,66%. Ini dikarenakan kepala desa menggunakan metode dan tenaga ahli yang terampil di bidang perekonomian seperti di bidang pertanian, perkebunan dan pembangunan, hal ini bisa ini bisa mendorong masyarakat dalam meningkatkan perekonomian desa. dan tangapan pada kategori “Kurang Mampu” sebanyak 40 orang responden atau 34,48 % karena kepala desa kurang mampu mengerjakan sebagian kecil masyarakat untuk bersipasif dikarenakan kesibukan aktifitas mereka masing-masing. Sedangkan tangapan responden pada kategori “Tidak Mampu” sebanyak 6 orang atau 5,17% ini menganggap bahwa kepala desa tidak mampu dalam memberikan pembinaan perekonomian desa.

Demikian juga apa yang dikatakan kepala dusun (pada april 2012) mengatakan:

“Kepala desa membina perekonomian desanya dengan cukup baik berupa penyuluhan dan pelatihan, bahkan kepala desa selalu mendatangkan ahli-ahli dibidang pertanian, perkebunan, dan pembangunan, sehingga hal ini menjadi motivasi dan semangat kerja kepada masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam pembinaan tersebut”

Jawaban pada kategori cukup lebih dominan dikarenakan kepala desa memiliki kemampuan pembinaan dengan cukup baik namun kepala desa belum bisa mengerakan sebagian kecil masyarakat untuk berpartisipasi dikarenakan kesibukan bekerja diladang dan dikebun dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dengan kata lain mereka hanya mau mengorbankan waktunya pada hari tertentu saja.

5.2.3. Kemampuan Dalam Memelihara Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Desa

Ketentraman dan ketertiban masyarakat merupakan tanggung jawab bersama antara kepala desa dan masyarakat desa. Kepala desa memiliki kemampuan dalam memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa dengan membentuk satuan keamanan lingkungan, dan mengikut sertakan masyarakat dalam memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Adapun tanggapan responden mengenai Kemampuan Dalam Memelihara Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Desa. Dapat diketahui pada tabel dibawah ini :

Tabel V.11 : Tangapan Responden Tentang Kemampuan KepalaDesa membentuk satuan keamanan lingkungan.

No	Alternatif Jawaban	Jumlah responden	Persentase (%)
1	Sangat mampu	9	15,52%
2	Mampu	10	17,24%
3	Cukup mampu	25	43,10%
4	Kurang mampu	12	20,69%
5	Tidak mampu	2	3,45%
Jumlah		58	100%

Sumber data : hasil penelitian lapangan,2012

Dari tabel V.4 diatas dari 58 responden,menyatakan kemampuan kepala desa, dalam memberikan pengarahan kepada masyarakat desa, yang menyatakan *Sangat Mampu* sebanyak 9 responden atau 15,52%, *Mampu* sebanyak 10 responden atau 17,24%, *Cukup mampu* sebanyak 25 responden atau 43,10% *Kurang mampu* sebanyak 12 responden atau 20,69% *Tidak mampu* 2 responden atau 3,45%

Tabel V.12 : Tangapan Responden Tentang kemampuan Kepala Desa mengerakan masyarakat untuk berkerja sama dalam memelihara keamanan lingkungan.

No	Alternatif Jawaban	Jumlah responden	Persentase (%)
1	Sangat mampu.	5	8,62%
2	mampu.	8	13,79%
3	Cukup mampu.	35	60,34%
4	Kurang mampu.	10	17,24%
5	Tidak mampu.	-	-
Jumlah		58	100%

Sumber data : hasil penelitian lapangan,2012

Dari tabel V.4 diatas dari 58 responden,menyatakan kemampuan kepala desa, dalam memberikan pengarahan kepada masyarakat desa, yang menyatakan *sangat mampu* sebanyak

5 responden atau 8,62%, *mampu* sebanyak 8 responden atau 13,79%,
cukup mampu sebanyak 35 responden atau 60,34% *kurang mampu*
 sebanyak 10 responden atau 17,24% *tidak mampu* 0 responden atau
 0,00%

Tabel V.13 : Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Fungsi Kepala Desa Dalam Memelihara ketentraman dan ketertiban dan masyarakat desa. di Desa Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak.

Sub Indikator	Kategori Jawaban										N	%
	Sangat mampu		mampu		Cukup mampu		Kurang mampu		Tidak mampu			
	f	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
Membentuk satuan keamanan lingkungan.	9	15,52	10	17,24	25	43,10	12	20,69	2	3,45	58	100
Memelihara keamanan lingkungan	5	8,62	8	19,79	35	60,34	10	17,24	-	-	58	100
JUMLAH	14	12,07	18	15,52	60	51,72	22	18,97	2	1,72	116	100

Sumber data : hasil penelitian lapangan, 2012

Dari tabel rekapitulasi diatas dapat diketahui bahwa pada masing- masing pernyataan positif yang penulis ajukan sebagai bahan angket untuk mengetahui tanggapan responden mengenai kemampuan kepala desa dalam Dalam memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa di Desa Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak, yang menjawab pada alternatif jawaban pada kategori “sangat mampu” sebanyak 14 orang responden atau 12,07%, ini bahwa kepala telah memelihara ketentraman dan ketertiban dengan membentuk satuan kemana lingkungan, tanggapan responden pada kategori “Mampu” sebanyak 18 orang responden atau 15,52%, bahwa

kepala desa membentuk satuan keamanan dan mengerakan masyarakat untuk berkerja sama, masyarakat tangapan responden pada kategori “Cukup Mampu” 60 orang responden atau 51,72 %., dikarenakan kepala desa membentuk satuan keamanan lingkungan namun tida keseluruhan masyarakat yang terlibat, karena ada sebagian kecil masyarakat yang kurang berpartisipasi karena mereka disibukan dengan aktifitasnya masing- masing. dan tangapan pada kategori ” Kurang Mampu” sebanyak 22 orang responden atau 18,97 % dikarenakan dalam memelihara ketertiban dan memelihara lingkungan kepala desa kurang berperan aktif dalam upaya memelihara keamanan lingkungan. sedangkan tangapan responden pada kategori “Tidak Mampu” sebanyak 2 orang atau 1,72%

Hal ini juga berdasarkan wawancara penulis dengan sekretaris desa sampel (22 april 2012) mereka mengatakan :

“Kepala desa sebenarnya telah memelihara ketentraman dan ketertiban lingkungan masyarakat desa.dalam musyawarah desa kepala desa selalu mengajak masyarakat dan setiap tindakannya selalu melibatkan masyarakat desa”

Tangapan responden pada kategori cukup mampu lebih banyak dikarenakan kepala desa memiliki kemampuan dalam memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa dengan membentuk satuan keamanan dan selalu berkerja sama dengan masyarakat desa.namun kepala desa kurang memperhatikan keluhan masyarakat baik berupa keamanan maupun ketertiban lingkungan.sehingga masyarakat merasakan terabaikan keamanan

dan ketertiban masyarakat maka dari kesimpulan pada sampel kepala desa hanya mampu membentuk satuan keamanan lingkungan dan melibatkan aparat desa ,tokoh masyarakat dan kelompok masyarakat saja, sementara ia kurang memperhatikan keluhan kesah masyarakat.

5.1.4. Kemampuan dalam melaksanakan musyawarah penyelesaian perselisihan masyarakat desa

Musyawarah merupakan suatu jalan yang harus ditempuh oleh kepala desa. Kemampuan melaksanakan musyawarah ini sangat diperlukan dalam menyelesaikan perselisihan masyarakat desa yang dipimpinnya. Kepala desa dituntut harus cermat dan teliti dalam mengambil kebijakan penyelesaiannya tersebut, jangan sampai dari kedua belah pihak ada yang dikorbankan.

Dari hasil tanggapan responden desa Muara Bungkal sampel mengenai kemampuan kepala desa dalam melaksanakan musyawarah penyelesaian perselisihan masyarakat desa dapat diketahui pada tabel dibawah ini :

Tabel V.14 : Tangapan Responden Tentang Melaksanakan Musyawarah Perselisihan Desa Dengan Mengambil Kebijakan dan Keputusan yang Adil.

No	Alternatif Jawaban	Jumlah responden	Persentase (%)
1	Sangat mampu.	-	-
2	Mampu	5	8,62%
3	Cukup mampu	30	51,72%
4	Kurang mampu	20	34,48%
5	Tidak mampu	3	5,17%
Jumlah		58	100%

Sumber data : hasil penelitian lapangan,2012

Dari tabel V.4 diatas dari 58responden,menyatakan kemampuan kepala desa, dalam memberikan pengarahan kepada masyarakat desa, yang menyatakan *Sangat mampu* sebanyak 0 responden atau 0,00%, *mampu* sebanyak 5 responden atau 8,62%, *Cukup mampu* sebanyak 30responden atau 51,72% *Kurang mampu* sebanyak 20 responden atau 34,48% *Tidak mampu* 3 responden atau 5,17%

Tabel V.15: Tangapan Responden Tentang Melaksanakan Musyawarah Perselisihan Desa Dengan memberikan alternatif – alternatif penyelesaiannya

No	Alternatif Jawaban	Jumlah responden	Persentase (%)
1	Sangat mampu	8	13,79%
2	Mampu	6	10,34%
3	Cukup mampu	9	15,52%
4	Kurang mampu	35	60,34%
5	Tidak mampu	-	-
Jumlah		58	100%

Sumber data : hasil penelitian lapangan,2012

Dari tabel V.4 diatas dari 58 responden, menyatakan kemampuan kepala desa, melaksanakan musyawarah penyelesaian perselisihan masyarakat desa dengan memberikan alternative-alternatif penyelesaiannya, yang menyatakan *Sangat mampu* sebanyak 8 responden atau 13,79%, *mampu* sebanyak 6 responden atau 10,34%, *Cukup mampu* sebanyak 9 responden atau 15,52% *Kurang mampu* sebanyak 35 responden atau 60,34% *Tidak mampu* 0 responden atau 0,00%

Tabel V.16: Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Fungsi Kepala Desa Dalam, Melaksanakan musyawarah penyelesaian perselisihan masyarakat desa, di Desa Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak

Sub Indikator	Kategori Jawaban										N	%
	Sangat mampu		mampu		Cukup mampu		Kurang mampu		Tidak mampu			
	f	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
Melaksanakan musyawarah penyelesaian perselisihan masyarakat desa,dengan mengambil kebijakan atau keputusan yang adil	-	-	5	8,62	30	51,72	20	34,48	3	5,17	58	100
Memberikan alternatif-al ternatif penyalasain mengenai perselisihan masyarakat desa.	8	13,79	6	10,34	9	15,52	35	60,34	-	-	58	100
JUMLAH	8	6,90	11	9,48	39	33,62	55	47,41	3	2,59	116	100

Sumber data : hasil penelitian lapangan, 2012

Dari tabel rekapitulasi diatas dapat diketahui bahwa pada masing-masing pernyataan positif yang penulis ajukan sebagai bahan angket untuk mengetahui tanggapan responden mengenai kemampuan kepala desa dalam Dalam melaksanakan musyawarah perselisihan masyarakat desa, di Desa Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau

Kabupaten Siak, yang menjawab pada alternatif jawaban pada kategori “sangat mampu” sebanyak 8 orang responden atau 6,90%, ini berarti bahwa kepala desa melaksanakan musyawarah perselisihan masyarakat desa, tanggapan responden pada kategori “Mampu” sebanyak 11 orang responden atau 9,48 %, dalam arti bahwa kepala desa telah melaksanakan musyawarah dan selalu meminta pendapat dari masyarakat, tanggapan responden pada kategori “Cukup Mampu” sebanyak 39 orang responden atau 33,62 %. dikarenakan dalam melaksanakan musyawarah mufakat dan menghadiri masyarakat-masyarakat terkait selalu meminta pendapat dari masyarakat tetapi, kepala desa tidak memberikan alternatif-alternatif tertentu, dan tanggapan pada kategori “Kurang Mampu” dikarenakan kepala desa tidak memberikan alternatif-alternatif tertentu sehingga masyarakat yang berselisih tidak merasa senang dengan keputusan tersebut . sebanyak 55 orang responden atau 47,41 % sedangkan tanggapan responden pada kategori “Tidak Mampu” sebanyak 3 orang atau 2,59 %.

Tanggapan responden pada kategori cukup mampu lebih banyak dikarenakan kepala desa memiliki kemampuan dalam melaksanakan musyawarah penyelesaian perselisihan masyarakat desa dengan melaksanakan musyawarah untuk mufakat dan menghadiri masyarakat-masyarakat yang terlibat dan terkait dalam perselisihan, mereka juga mengambil kebijakan dan keputusan yang adil sehingga tidak merugikan kedua belah pihak yang berselisih, namun kepala desa tidak memberikan alternatif-alternatif tertentu, sehingga masyarakat yang berselisih merasa tidak senang dengan keputusan tersebut.

5.1.5. Kemampuan dalam menyusun dan merancang peraturan desadengan persetujuan BPD

Dalam menyusun dan merancang peraturan desa dengan persetujuan BPD, kepala desa di tuntut mampu menyusun dan merancang peraturan desa dengan meminta persetujuan BPD kemudian barulah peraturan tersebut ditandatangani oleh bupati selaku kepala daerah asalkan perturan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan daerah kabupaten siak. kepala desa dalam menyusun dan merancang peraturan desa haruslah mengacu pada kepentingan masyarakat desa dan pada kesejahteraan masyarakat secara umum serta mengikat pada keseluruhan masyarakat desa dengan melibatkan BPD dan lembaga kemasyarakatan yang mengurus pembngunan.

Adapun tanggapan responden mengenai Kemampuan kepala Desa dalam menyusun dan merancang peraturan desa dengan meminta persetujuan BPD, Dapat diketahui pada tabel dibawah ini

Tabel V.17: Tangapan Responden TentangMenyusun Rancangan Peraturan yang Sesuai Dengan Kepentingan Masyarakat.

No	Altenatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Sangat mampu	-	-
2	Mampu	3	5,17%
3	Cukup mampu	25	43,10%
4	Kurang mampu	20	34,48%
5	Tidak mampu	10	17,24%
Jumlah		58	100%

Sumber data : hasil penelitian lapangan,2012

Dari tabel V.4 diatas dari 58 responden,menyatakan kemampuan Menyusun dan merancang peraturan peraturan desa dengan persetujuan BPDdengan,yang menyatakan *sangat mampu*

sebanyak 0 responden atau 0,00%, *mampu* sebanyak 3 responden atau 5,17%, *cukup mampu* sebanyak 25 responden atau 43,10% *kurang mampu* sebanyak 20 responden atau 34,48% *tidak mampu* 10 responden atau 17,24%

Tabel V.18: Tangapan Responden Tentang menyusun dan merancang peraturan desa bersama BPD, mengenai menyusun rancangan peraturan yang memperhatikan kesejahteraan secara umum.

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Sangat mampu	2	3,45%
2	Mampu	6	10,34%
3	Cukup mampu	15	25,86%
4	Kurang mampu	26	44,83%
5	Tidak mampu	9	15,52%
Jumlah		58	100%

Sumber data : hasil penelitian lapangan, 2012

Dari tabel V.4 diatas dari 58 responden, menyatakan kemampuan kepala desa, Memperhatikan kesejahteraan masyarakat secara umum. Serta mengikat pada keseluruhan masyarakat desa dengan melibatkan BPD dan lembaga kemasyarakatan yang mengurus mengenai pembangunan, yang menyatakan *sangat mampu* sebanyak 2 responden atau 3,45%, *mampu* sebanyak 6 responden atau 10,34%, *cukup mampu* sebanyak 15 responden atau 25,86% *kurang mampu* sebanyak 26 responden atau 44,83% *tidak mampu* 9 responden atau 15,52%.

Tabel V.19 : Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Fungsi Kepala Desa Dalam Menyusun dan merancang peraturan desa dengan persetujuan BPD di Desa Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak.

Sub Indikator	Kategori Jawaban										N	%
	Sangat mampu		mampu		Cukup mampu		Kurang mampu		Tidak mampu			
	f	%	F	%	F	%	F	%	f	%		
Memperhatikan kepentingan masyarakat Dalam menyusun rancangan peraturan desa	-	-	3	5,17	25	43,10	20	34,48	10	17,24	58	100
Memperhatikan kesejahteraan masyarakat secara umum. Serta mengikat pada keseluruhan masyarakat desa dengan melibatkan BPD dan lembaga kemasyarakatan yang mengurus mengenai pembangunan	2	3,45	6	10,34	15	25,86	26	44,83	9	11,52	58	100
JUMLAH	2	1,72	9	7,76	39	33,62	55	47,41	19	16,38	116	100

Sumber data : hasil penelitian lapangan, 2012

Dari tabel diatas dapat diketahui tanggapan responden mengenai kemampuan kepala desa dalam menyusun dan merancang peraturan desa di Desa Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak termasuk pada kategori “sangat mampu” sebanyak 2 orang responden atau 1,72%, bahwa kepala desa telah membuat rancangan peraturan desa tanggapan responden pada kategori “Mampu” sebanyak 9 orang responden atau 7,76%, dikarenakan kepala desa membuat rancangan peraturan desa dengan melibatkan BPD, tanggapan responden pada kategori “Cukup Mampu” sebanyak 39 orang responden atau 33,62 %. Bahwa kepala desa membuat rancangan peraturan desa dengan melibatkan BPD, namun terkadang peraturan

yang di buat kurang menyentuh kepentingan masyarakat menengah ke bawah secara umum dan tangapan pada kategori “Kurang Mampu” sebanyak 55 orang responden atau 47,41 % dikarenakan dalam rancangan peraturan desa melibatkan BPD, tetapi tidak meminta saran dari masyarakat, sedangkan tangapan responden pada kategori “Tidak Mampu” sebanyak 19 orang atau 16,38 %.,

Ini disesuaikan dengan hasil wawancara penulis dengan ketua BPD (23 april 2012) ia mengatakan :

“kepala desa memang menyusun dan merancang peraturan desa serta meminta persetujuan dengan kami para anggota BPD, akan tetapi peraturan desa yang dibuat kadang-kadang kurang menyentuh kepentingan masyarakat kecil menengah kebawah melainkan untuk kegiatan kelompok saja sedangkan masyarakat kecil tidak di ajak dalam musyawarah tersebut.”

Maka dari kesimpulan rekap hasil penelitian mengenai kemampuan kepala desa dalam menyusun dan merancang peraturan desa dapat dikatakan cukup mampu dikarenakan kepala desa mampu menyusun dan merancang peraturan desa dengan persetujuan BPD dan melibatkan lembaga masyarakat, serta mengacu kepada kepentingan masyarakat akan tetapi peraturan yang di buat kurang menyentuh kepentingan masyarakat secara umum.

5.2.6. Kemampuan kepala desa dalam membuat perencanaan pembangunan

Kemampuan dalam merencanakan pembangunan desa sebaiknya kepala desa terlebih dahulu mengadakan musyawarah dan menjelaskan tujuan dari pembangunan tersebut, kemudian barulah

menentukan langkah-langkah dalam pelaksanaan pembangunan. Selanjutnya saran, ide-ide dan tanggapan masyarakat dirumuskan dalam perencanaan pembangunan desa.

Dari hasil wawancara dengan ketua BPD desa Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak, (April: 2012) mengatakan :

“kepala desa memang menjelaskan tujuan dari pelaksanaan pembangunan kepada masyarakat melalui musyawarah desa, tetapi kepala desa tidak membuat langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan, seharusnya kepala desa itu membuat langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan, seharusnya kepala desa itu membuat langkah-langkah misalnya: dalam hal pengerjaan apa yang semestinya didahulukan dalam pengadaan bahan, kapan bahan tersebut harus sampai di lokasi pembangunan, kemudian peralatan apa yang perlu di sediakan”.

Wawancara diatas menjelaskan kepala desa Cukup Mampu melaksanakan musyawarah dan menjelaskan tujuan dari pelaksanaan pembangunan, akan tetapi ia tidak menentukan langkah-langkah apa yang mesti dikerjakan oleh masyarakat dan aparat desa. Sehingga masyarakatkurang mau berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan.

Adapun tanggapan responden mengenai Kemampuan kepala Desa dalam membuat perencanaan pembagunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa, dapat diketahui pada tabel dibawah ini :

Tabel V.20: Tangapan responden mengenai kemampuan kepala desa dalam membuat perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan desa.

No	Alternatif Jawaban	Jumlah responden	Persentase (%)
1	Sangat mampu	5	8,62%
2	Mampu	2	3,45%
3	Cukupmampu.	26	44,83%
4	Kurang mampu	10	17,24%
5	Tidak mampu	15	25,86%
Jumlah		58	100%

Sumber data : hasil penelitian lapangan,2012

Dari tabel V.4 diatas dari 58 responden,menyatakan kemampuan kepala desa,Kemampuan kepala desa dalam membuat perencanaan pembangunan,yang menyatakan *sangat mampu* sebanyak 5 responden atau 8,62%, *mampu* sebanyak2 responden atau 3,45%, *cukup mampu* sebanyak 26 responden atau 44,83% *kurang mampu* sebanyak 10 responden atau 17,24% *tidakmampu*15 responden atau 25,86%

Tabel V.21: Tangapan responden mengenai kemampuan kepala desa dalam membuat perencanaan pembangunan dengan menentukan tujuan dari pelaksanaan pembangunan tersebut.

No	Alternatif Jawaban	Jumlah responden	Persentase (%)
1	Sangat mampu	-	-
2	Mampu	10	17,24%
3	Kurang mampu.	35	60,34%
4	Kurang mampu	8	13,79%
5	Tidak mampu	5	8,62%
Jumlah		58	100%

Sumber data : hasil penelitian lapangan,2012

Dari tabel V.4 diatas dari 58 responden, menyatakan kemampuan kepala desa, dalam membuat perencanaan pembangunan dengan menentukan tujuan dari pelaksanaan pembangunan tersebut. Yang menyatakan *sangat mampu* sebanyak 0 responden atau 0,00%, *mampu* sebanyak 10 responden atau 17,24%, *cukup mampu* sebanyak 35 responden atau 60,34% *kurang mampu* sebanyak 8 responden atau 14,79% *tidak mampu* 5 responden atau 8,62%

Tabel V.22: Tangapan responden mengenai kemampuan kepala desa dalam membuat perencanaan pembangunan dengan membuat langkah-langkah dalam pelaksanaan pembangunan tersebut.

No	Alternatif Jawaban	Jumlah responden	Persentase (%)
1	Sangat mampu.	-	-
2	Mampu	11	18,97%
3	Cukup mampu.	25	43,10%
4	Kurang mampu.	20	34,48%
5	Tidak mampu.	2	3,45%
Jumlah		58	100%

Sumber data : hasil penelitian lapangan, 2012

Dari tabel V.4 diatas dari 58 responden, menyatakan kemampuan kepala desa, dalam membuat perencanaan pembangunan dengan membuat langkah-langkah dalam pelaksanaan pembangunan tersebut., yang menyatakan *sangat mampu* sebanyak 0 responden atau 0,00%, *mampu* sebanyak 11 responden atau 18,97%, *cukup mampu* sebanyak 25 responden atau 43,10% *kurang mampu* sebanyak 20 responden atau 34,48% *tidak mampu* 2 responden atau 3,45%

Tabel V.23: Tangapan responden mengenai kemampuan kepala desa dalam membuat perencanaan pembangunan dengan menanggapi aspirasi masyarakat dalam merumuskan perencanaan pelaksanaan pembangunan tersebut

No	Alternatif Jawaban	Jumlah responden	Persentase (%)
1	Sangat mampu	6	10,34%
2	Mampu	8	13,79%
3	Cukup mampu	15	25,86%
4	Kurang mampu	26	44,83%
5	Tidak mampu	3	5,17%
Jumlah		58	100%

Sumber data : hasil penelitian lapangan, 2012

Dari tabel V.4 diatas dari 58 responden, menyatakan kemampuan kepala desa, membuat perencanaan pembangunan dengan menanggapi aspirasi masyarakat dalam merumuskan perencanaan pelaksanaan pembangunan tersebut., yang menyatakan *sangat mampu* sebanyak 6 responden atau 10,34%, *mampu* sebanyak 8 responden atau 13,79%, *Cukup mampu* sebanyak 15 responden atau 25,86% *Kurang mampu* sebanyak 26 responden atau 44,83% *tidak mampu* 3 responden atau 5,17%.

Tabel V.24: Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Fungsi Kepala Desa Dalam Membuat Perencanaan Pembangunan Sesuai Dengan Kebutuhan Desa Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak.

Sub Indikator	Kategori Jawaban										N	%
	Sangat mampu		mampu		Cukup mampu		Kurang mampu		Tidak mampu			
	f	%	F	%	F	%	F	%	f	%		
Perencanaan pembangunan harus sesuai dengan kebutuhan desa	5	8,62	2	3,45	26	44,83	10	17,24	15	25,86	58	100
Harus menentukan tujuan pembangunannya	-	-	10	17,24	35	60,34	8	13,79	5	8,62	58	100
Kepala desa harus menetapkan langkah langkahnya	-	-	11	18,97	25	43,10	20	34,48	2	3,45	58	100
Kepala desa harus tangap dengan aspirasi masyarakat dengan melibatkan dalam merumuskan perencanaan.	6	10,34	6	10,34	8	13,79	26	44,83	3	5,17	58	100
JUMLAH	6	2,59	38	16,38	94	40,52	64	27,59	23	9,91	232	100

Sumber data : hasil penelitian lapangan, 2012

Dari tabel diatas dapat diketahui tanggapan responden mengenai kemampuan kepala desa dalam membuat perencanaan pemabangunan di Desa Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak termasuk pada kategori “sangat mampu” sebanyak 6 orang responden atau 2,59%, bahwa kepala desa telah membuat perencanaan pembangunan. Tanggapan responden pada kategori “Mampu” sebanyak 38 orang responden atau 16,38%, dikarenakan kepala desa membuat perencanaan dengan menentukan tujuan dan melibatkan masyarakat, tanggapan responden pada kategori

“Cukup Mampu” sebanyak 94 orang responden atau 40,52 %, karena kepala desa mampu membuat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan namun ia tidak menentukan langkah-langkahnya, dan tanggapan pada kategori “Kurang Mampu” sebanyak 64 orang responden atau 27,59% dikarenakan kepala desa memang menjelaskan tujuan dan melibatkan masyarakat tetapi kepala desa tidak membuat langkah-langkah nya sehingga masyarakat dan aparat desa kurang mau berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, sedangkan tanggapan responden pada kategori “Tidak Mampu” sebanyak 23 orang atau 9,91 %

Ini disesuaikan dengan hasil wawancara dengan ketua BPD pada (23 april 2012) mengatakan :

Kepala desa memang menjelaskan tujuan dari pelaksanaan pembangunan kepada masyarakat melalui musyawarah desa, tetapi kepala desa tidak membuat langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan. Seharusnya kepala desa itu membuat langkah- langkah misalnya : dalam hal pekerjaan apa yang semestinya dilakukan, dalam pengadaan bahan, kapan bahan tersebut harus sampai di lokasi pembangunan, kemudian peralatan apa yang perlu disediakan”

Maka dari kesimpulan hasil penelitian pada kemampuan kepala desa dalam membuat perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan desa. Dikatakan cukup mampu karena kepala desa

menjelaskan tujuan pembangunan, dan melibatkan masyarakat dalam merumuskan perencanaan, tetapi kepala desa dalam membuat atau menyusun perencanaan pembangunan tidak membuat langkah-langkah apa yang seharusnya diambil untuk mencapai tujuan tersebut.

5.1.7. Kemampuan dalam Memberikan pengarahan kepada bawahan atau masyarakat dalam melaksanakan pembangunan

Kepala desa merupakan pemimpin terdepan dalam mengerakan dan pengarahan aparat desa dan masyarakat untuk selalu berkerjasama dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Adapun tanggapan responden mengenai, Kemampuan dalam Memberikan pengarahan kepada bawahan atau masyarakat dalam melaksanakan pembangunan Dapat diketahui pada tabel dibawah ini :

Tabel V.25 :Tanggapan responden mengenai kemampuan kepala desa dalam mengerakan masyarakat dan aparat desa untuk berkerjasama dalam pelaksanaan paembangunan.

No	Alternatif Jawaban	Jumlah responden	Persentase (%)
1	Sangat Mampu	2	3,45%
2	Mampu	30	51,72%
3	Cukup Mampu	15	25,86%
4	Kurang Mampu.	10	17,24%
5	Tidak Mampu	1	1,72%
Jumlah		58	100%

Sumber data : hasil penelitian lapangan,2012

Dari tabel V.4 diatas dari 58 responden,menyatakan kemampuan kepala desa,dalammemberikan pengarahan kepada bawahan atau masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan,dengan mengerakan masyarakat dan aparat desa untuk berkerjasama dalam pelaksanaan paembangunan,yang menyatakan *sangat*

mampusebanyak 2 responden atau 3,45%, *Mampusebanyak* 30 responden atau 51,72%, *Cukup Mampusebanyak* 15 responden atau 25,86% *kurang mampusebanyak* 10 responden atau 17,24% *Tidak mampu* 1 responden atau 1,72%

Tabel V.26 : Tangapan responden mengenai kemampuan kepala desa mengendalikan masyarakat dan aparat desa dalam pelaksanaan pembangunan.

No	Alternatif Jawaban	Jumlah responden	Persentase (%)
1	Sangat mampu	6	10,34%
2	Mampu	15	26,86%
3	Cukup Mampu.	26	44,82%
4	Kurang Mampu	10	17,24%
5	Tidak Mampu	1	1,72%
Jumlah		58	100%

Sumber data : hasil penelitian lapangan,2012

Dari tabel V.4 diatas dari 58 responden,menyatakan kemampuan kepala desa,desa dalam memberikan pengarahan kepada bawahan atau masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan,dengan mengendalikan masyarakat dan aparat desa dalam pelaksanaan paembangunan,yang menyatakan *SangatMampusebanyak* 6 responden atau 10,44%, *Mampu* sebanyak 30 responden atau 51,72%, *Cukup Mampusebanyak* 30 responden atau 51,72% *kurang mampusebanyak* 10 responden atau 17,24% *tidak Mampu*1 responden atau 1,72%.

Tabel V.27 : Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Fungsi Kepala Desa Dalam Memberikan pengarahan kepada bawahan atau masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak.

Sub Indikator	Kategori Jawaban										N	%
	Sangat mampu		mampu		Cukup mampu		Kurang mampu		Tidak mampu			
	f	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
Mengerakan masyarakat dan aparat desa untuk bekerja sama dalam plaksanaan pembangunan.	2	3,45	30	51,72	15	25,86	10	17,24	1	1,72	58	100
mengendalikan masyarakat dan aparat desa untuk berkerja sama dalm pelaksanaan pembangunan.	6	10,34	15	25,86	26	44,82	10	17,24	1	1,72	58	100
JUMLAH	8	6,90	45	38,79	41	35,34	20	17,24	2	1,72	116	100

Sumber data : hasil penelitian lapangan, 2012

Dari tabel diatas dapat diketahui tanggapan responden mengenai kemampuan kepala desa dalam membuat perencanaan pemabangunan di Desa Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak termasuk pada kategori “sangat mampu” ini bahwa kepala desa memberikan pengarahan kepada bawahan atau masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. sebanyak 8 orang responden atau 6,90%, tanggapan responden pada kategori dikarenakan kepala desa mengerkan masyarakat dan aparat dea untuk berkerjasama dalam pelaksanaan pembangunan, “Mampu” kepala desa hanya mengerkan masyarakat untuk berkerja sama dalam pelaksanaan pembangunan

dan kepala desa, sebanyak 45 orang responden atau 38,79%, tanggapan responden pada kategori “Cukup Mampu” sebanyak 41 orang responden atau 35,34 %. kepala hanya mengerkan masyarakat untuk berkerja sama dalam pelaksanaan pembangunan dan kepala desa kurang bisa mengendalikan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, dan tanggapan pada kategori ” Kurang Mampu” sebanyak 20 orang responden atau 17,24 % dikarenakan kepala desa kurang mampu mengerkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, sedangkan tanggapan responden pada kategori “Tidak Mampu” sebanyak 2 orang atau 1,72 %.

Disesuaikan dengan wawancara penulis dengan sekretaris desa (pada tanggal 23 april 2012)

“Sebelumnya melaksanakan pembangunan desa kepala desa selalu memberikan pengarah- pengarah tentng apa yang akan dikerjakan terutama kepada aparat desa dan kepal urusan pembngunan, kemudian aparat desa di perintahkan mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan pembangunan desa berupa sumbangan uang, tenaga dan pikiran”

Maka dari kesimpulan penelitian pada kemampuan kepala desa dalam memberikan pengarah- pengarah kepada bawahan atau masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dikatakan cukup mampu karena dalam mengerkan dan mengarahkan aparat desa dan masyarakat untuk selalu berkerja samadalam pelaksanaan pembangunan desa, tetapi kepala desa kurang bisa mengendalikan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan.

5.1.8 Kemampun Dalam Mengambil Keputusan Dalam Proses Penyelenggaraan Pembangunan.

Kepala desa dituntut mampu mengambil keputusan dengan memberikan alternatif-alternatif terbaik bagi masyarakat dan kelompok-kelompok yang ada di desa serta tegas dengan keputusan tersebut.

Adapun tanggapan responden mengenai, Kemampuan dalam Memberikan pengarahan kepada bawahan atau masyarakat dalam melaksanakan pembangunan Dapat diketahui pada tabel dibawah ini:

Tabel V.28 : Tanggapan responden mengenai kemampuan kepala desa dalam mengambil keputusan dalam proses penyelenggaraan pembangunan

No	Alternatif Jawaban	Jumlah responden	Persentase (%)
1	Sangat Mampu	3	5,17%
2	Mampu	5	8,62%
3	Cukup Mampu	20	34,48%
4	Kurang Mampu	30	51,72%
5	Tidak Mampu	-	-
Jumlah		58	100%

Sumber data : hasil penelitian lapangan, 2012

Dari tabel V.4 diatas dari 58 responden, menyatakan kemampuan kepala desa, membuat perencanaan pembangunan dengan menanggapi aspirasi masyarakat dalam merumuskan perencanaan pelaksanaan pembangunan tersebut, yang menyatakan *sangat mampu* sebanyak 3 responden atau 5,17%, *mampu* sebanyak 5 responden atau 8,62%, *cukup mampu* sebanyak 20 responden atau 34,48% *kurang mampu* sebanyak 30 responden atau 51,72% *tidak mampu* 0 responden atau 0,00%

Tabel V.29 : Tangapan responden mengenai kemampuan kepala desa dalam Memilih alternative terbaik dalam menetapkan keputusan dalam plaksanaan pembangunan.

No	Alternati Jawaban	Jumlah responden	Persentase (%)
1	Sangat Mampu	-	-
2	Mampu	5	8,62%
3	Cukup Mampu	35	60,34%
4	Kurang Mampu	30	51,72%
5	Tidak Mampu	3	5,17%
Jumlah		58	100%

Sumber data : hasil penelitian lapangan,2012

Dari tabel V.4 diatas dari 58 responden,menyatakan kemampuan kepala desa,mengambil keputusan dalam proses penyelenggaraan pembangunan,Memilih alternative terbaik dalam menetapkan keputusan dalam plaksanaan pembangunan.Yang menyatakan *sangat mampu* sebanyak 0 responden atau 0,00%, *mampu* sebanyak 5 responden atau 8,62%, *cukup mampu* sebanyak 35 responden atau 60,34% *kurang mampu* sebanyak 30 responden atau 51,72% *tidak mampu* 3 responden atau 5,17%

Tabel V.30 : Tangapan responden mengenai kemampuan kepala desa Tegas dalam menetapkan keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan.

No	Jawaban	Jumlah responden	Persentase (%)
1	Sangat Mampu	10	17,24%
2	Mampu	6	10,34%
3	Cukup Mampu	26	44,83%
4	Kurang Mampu	15	25,86%
5	Tidak Mampu	1	1,72
Jumlah		58	100%

Sumber data : hasil penelitian lapangan,2012

Dari tabel V.4 diatas dari 58 responden, menyatakan kemampuan kepala desa, mengambil keputusan dalam proses penyelenggaraan pembangunan. Tegas dalam menetapkan keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan. yang menyatakan *sangat mampu* sebanyak 10 responden atau 17,24%, *mampu* sebanyak 6 responden atau 10,34%, *cukup mampu* sebanyak 26 responden atau 44,83% *kurang mampu* sebanyak 15 responden atau 25,86% *tidak mampu* 1 responden atau 1,72%.

Tabel V.31 : Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Fungsi Kepala Desa Dalam Mengambil Keputusan Dalam Dalam Proses Penyelenggaraan Pembangunan di Desa, Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak.

Sub Indikator	Kategori Jawaban										N	%
	Sangat Mampu		Mampu		Cukup mampu		Kurang Mampu		Tidak Mampu			
	f	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
Mengambil keputusan terbaik yang berkaitan dengan plaksanaan pembangunan.	3	5,17	5	8,62	20	34,48	30	51,72	-	-	58	100
Memilih alternative terbaik dalam menetapkan keputusan dalam plaksanaan pembanguna	-	-	5	8,62	35	60,34	15	25,86	3	5,17	58	100
Tegas dalam menetapkan keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan	10	17,24	6	10,34	26	44,83	15	25,86	1	1,2	58	100
JUMLAH	13	7,47	16	9,20	81	46,55	60	34,48	4	2,30	174	100

Sumber data : hasil penelitian lapangan, 2012

Dari tabel diatas dapat diketahui tanggapan responden mengenai kemampuan kepala desa dalam mengkoordinir penyelenggaraan pembangunan desa di Desa Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak termasuk pada kategori “sangat mampu” sebanyak 13 orang responden atau 7,47%, ini berarti bahwa kepala desa telah mengambil keputusan dalam proses penyelenggaraan pembangunan. Tanggapan responden pada kategori “Mampu” sebanyak 16 orang responden atau 9,20%, karena kepala desa mengajak masyarakat dan kelompok masyarakat dan melakukan musyawarah dalam rangka pengambilan keputusan. tanggapan responden pada kategori “Cukup Mampu” sebanyak 81 orang responden atau 46,55 %, dikarenakan kepala desa memiliki kemampuan dalam pengambilan keputusan dalam proses penyelenggaraan pembangunan, namun kepala desa kurang memiliki ketegasan dengan keputusan yang diambilnya. dan tanggapan pada kategori” Kurang Mampu” sebanyak 60 orang responden atau 34,48% kepala desa kurang tegas dengan keputusan yang telah diambilnya jadi tersanya kepala desa plin-plan. sedangkan tanggapan responden pada kategori “Tidak Mampu” sebanyak 4 orang atau 2,30 %.

Adapun jawaban responden yang dominan yaitu pada kategori cukup mampu lebih banyak dikarenakan kepala desa memiliki kemampuan dalam mengambil keputusan proses penyelenggaraan

pembangunan dan masyarakat dan kelompok masyarakat untuk mengikuti musyawarah mengenai pembangunan yang dilaksanakan, namun kepala desa dalam mengambil keputusan kurang memiliki ketegasan dengan keputusan yang telah diambilnya misalnya :dalam menetapkan pekerjaan apa yang harus dilakukan namun setelah ditetapkan kepala desa sering kali mengubah keputusan yang telah ditetapkan sebelumnya ,ini menyebabkan masyarakat dan aparat desa kurang bersemangat dalam proses pembangunan.

5.2.9. Kemampuan dalam mengkoordinir penyelenggaraan pembangunan desa

Kepala desa dituntut mampu dalam mengkoordinir penyelenggaraan pembangunan desa (melakukan pembagian tugas terhadap aparat desa dan masyarakat desa dalam pembangunan) mengambil keputusan dengan memberikan alternatif-alternatif terbaik bagi masyarakat dan kelompok yang ada di desa serta tegas dengan keputusan tersebut.

Pelaksanaan pembangunan desa akan berhasil apabila kepala desa mengkoordinir penyelenggaraan pembangunan dan membentuk kelompok-kelompok pembagian tugas kepada aparat desa, tokoh masyarakat dan aparat desa mengkoordinir penyelenggaraan pembangunan desa selalu berkerja sama dan saling bertanggung jawab antara kepala desa dengan masyarakat.

Adapun tanggapan responden mengenai, Kemampuan kepala desa Dalam Mengambil Keputusan Dalam Proses Penyelenggaraan Pembangunan. Dapat diketahui pada tabel dibawah ini:

Tabel V.32 : Tanggapan responden mengenai kemampuan kepala desa dalam mengkoordinir pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan pembangunan:

No	Alternatif Jawaban	Jumlah responden	Persentase (%)
1	Sangat mampu	1	1,72%
2	Mampu	4	6,90%
3	Cukup mampu	25	43,10%
4	Kurang mampu	15	25,86%
5	Tidak mampu	13	22,41%
Jumlah		58	100%

Sumber data : hasil penelitian lapangan,2012

Dari tabel V.4 diatas dari 58 responden, menyatakan kemampuan kepala desa, mengkoordinir pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan pembangunan yang menyatakan *sangat mampu* sebanyak 1 responden atau 1,72%, *mampu* sebanyak 4 responden atau 6,90%, *cukup mampu* sebanyak 25 responden atau 43,10% *Kurang Mampu* sebanyak 15 responden atau 25,86% *tidak mampu* 13 responden atau 22,41%

Tabel V.33 : Tanggapan responden mengenai kemampuan kepala desa dalam Pembagian tugas terhadap pihak terkait, (aparatur desa, pemuka masyarakat, dan masyarakat desa.

No	Alternatif Jawaban	Jumlah responden	Persentase (%)
1	Sangat Mampu	-	-
2	Mampu	10	17,24%
3	Cukup Mampu	15	25,86%
4	Kurang Mampu	23	39,65%
5	Tidak Mampu	10	17,24%
Jumlah		58	100%

Sumber data : hasil penelitian lapangan,2012

Dari tabel V.4 diatas dari 58 responden, menyatakan kemampuan kepala desa, mengkoordinir pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan pembangunan, Pembagian tugas yang tugas terhadap pihak terkait, (aparatur desa, pemuka masyarakat, dan masyarakat desa), yang menyatakan *sangat mampu* sebanyak 0 responden atau 0,00%, *mampu* sebanyak 10 responden atau 17,24%, *cukup mampu* sebanyak 15 responden atau 25,86% *tidak mampu* sebanyak 23 responden atau 39,65% *tidak mampu* 10 responden atau 17,24%

Tabel V.34 : Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Fungsi Kepala Desa Dalam Mengkoordinir Penyelenggaraan Pembangunan, di Desa Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak.

Sub Indikator	Kategori Jawaban										N	%
	Sangat mampu		mampu		Cukup mampu		Kurang mampu		Tidak mampu			
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
Mengkoordinir pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan program pembangunan,	1	1,72	4	6,90	25	43,10	15	25,86	13	22,41	58	100
Pembagian tugas-tugas terhadap pihak terkait,(aparatur desa,pemuka masyarakat,dan masyarakat desa.)	-	-	10	17,24	15	25,86	23	39,65	10	17,24	58	100
JUMLAH	1	0,86	14	12,07	40	34,48	38	32,76	23	19,83	116	100

Sumber data : hasil penelitian lapangan, 2012

Dari tabel diatas dapat diketahui tanggapan responden mengenai kemampuan kepala desa dalam mengkoordinir penyelenggaraan pembangunan desa di Desa Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak termasuk pada kategori “sangat mampu” sebanyak 1 orang responden atau 0,86 ini berarti bahwa kepala desa telah mengkoordinir penyelenggaraan pembangunan desa, tanggapan responden pada kategori “Mampu” sebanyak 14 orang responden atau 12,07%, dikarenakan kepala desa membentuk kelompok-kelompok dan pembagian tugas terhadap aparat desa atau tokoh masyarakat, desa tanggapan responden pada kategori “Cukup Mampu” sebanyak 40 orang responden atau 34,48 %. Dikarenakan kepala desa tidak memberikan tugas terhadap masyarakat, karena kepala desa menganggap masyarakat selalu lalai dalam menjalankan tugas. Karena kepala desa kurang membentuk kelompok-kelompok masyarakat dan tidak melakukan pembagian tugasnya. tanggapan pada kategori “Kurang Mampu” sebanyak 38 orang responden atau 32,76 % sedangkan tanggapan responden pada kategori “Tidak Mampu” sebanyak 23 orang atau 19,83 %.

Disesuaikan Dari hasil wawancara dengan kepala desa Muara Bungkal (April 2012) beliau mengatakan :

“Dalam hal mengkoordinir penyelenggaraan pembangunan desa saya terlebih dahulu membicarakannya dalam musyawarah desa. Kemudian membentuk kelompok-kelompok unit kerja dalam pembagian tugas terhadap aparat desa, pemuka masyarakat dan masyarakat desa yang meliputi: pengadaan bahan dan peralatan, serta pengerjaan bangunan dan sebagainya”

Adapun tanggapan responden pada kategori cukup mampu lebih banyak karena kepala desa memiliki kemampuan dalam mengkoordinir penyelenggaraan pembangunan dengan membentuk kelompok-kelompok dan pembagian tugas terhadap aparat desa dan tokoh masyarakat,api kepala desa tidak membentuk kelompok dan pembagian tugas kepada masyarakat desa hal ini menurut kepala desa masyarakat acuh tak acuh dengan tugas yang di berikan . maka dapat disimpulkan bahwa kepala desa cukup mampu dalam menkoordinir penyelenggaraan pembangunan, hanya saja kepala desa kurang membentuk kelompok-kelompok masyarakat dan tidak melakukan pembagian tugasnya.

5.2.10 Kemampuan dalam mengawasi aktifitas-aktifitas dalam proses penyelenggaraan pembangunan desa

Kepala desa di tuntutan memiliki kemampuan dalam mengawasi aktifitas-aktifitas penyelenggaraan pembangunan desa dan segera memperbaiki bila terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam kegiatan pembangunan dilokasi pembangunan.

Mengawasi aktifitas-aktifitas pembangunan desa perlu dilakukan kepal desa karena disanalah sumber permasalahan pembngunan terjadi. Dimana sering terjadinya penyimpangan – penyimpangan dan kecurangan seperti: pengurangan bahan material, pengurangan jam kerja, atau mempercepat waktu istirahat dari waktu yang seharusnya. Halini perlu dilakukan perbaikan dan tindakan serta sangsi dari kepala desa, agar pproses penyelenggaraan pembangunan bisa berjalan sesuai dengan tujuan yang di capai.

Adapun tanggapan responden desa Muara Bungkal mengenai kemampuan kepala desa dalam mengawasi aktifitas-aktifitas dalam proses penyelenggaraan pembangunan desa dapat di ketahui pada tabel dibawah ini :

Tabel V.35 :Tanggapan responden mengenai kemampuan kepala desa dalam mengawasi semua aktifitas–aktifitas dalam proses penyelenggaraan pembangunan desa,Kepala desa memonitor kegiatan pelaksanaan pembangunan.

No	Jawaban	Jumlah responden	Persentase (%)
1	Sangat Mampu	-	-
2	Mampu	10	17,24%
3	Cukup Mampu.	35	60,34%
4	Kurang Mampu	8	13,79%
5	Tidak Mampu	5	8,62
Jumlah		58	100%

Sumber data : hasil penelitian lapangan,2012

Dari tabel V.4 diatas dari 58 responden,menyatakan kemampuan kepala desa,membuat perencanaan pembangunan dengan menanggapi aspirasi masyarakat dalam merumuskan perencanaan pelaksanaan pembangunan tersebut,yang menyatakan *sangat mampu* sebanyak 0 responden atau 0,00%, *mampu* sebanyak 10 responden atau 17,24%, *cukup mampu* sebanyak 35 responden atau 60,34% *kurang mampu* sebanyak 8 responden atau 13,79% *tidak mampu* 5 responden atau 8,62%.

Tabel V.36 : Tangapan responden mengenai kemampuan kepala desa dalam mengawasi semua aktifitas-aktifitas dalam proses penyelenggaraan pembangunan desa,Memperbaiki penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan.

No	Jawaban	Jumlah responden	Persentase (%)
1	Sangat Mampu	3	5,17%
2	Mampu	15	25,86%
3	Cukup Mampu.	17	29,31%
4	Kurang Mampu	18	31,03%
5	Tidak mampu	5	8,62%
Jumlah		58	100%

Sumber data : hasil penelitian lapangan,2012

Dari tabel V.4 diatas dari 58 responden,menyatakan kemampuan kepala desa,membuat perencanaan pembangunan dengan menanggapi aspirasi masyarakat dalam merumuskan perencanaan pelaksanaan pembangunan tersebut,yang menyatakan *sangat mampu* sebanyak 3 responden atau 5,17%, *mampu* sebanyak 15 responden atau 25,86%, *cukup sering* sebanyak 17 responden atau 29,31% *kurang mampu* sebanyak 18 responden atau 31,03% *tidak mampu* 5 responden atau 8,62%

Tabel V.37 : Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Fungsi Kepala Desa Dalam, Mengawasi Semua Aktifitas-Aktifitas Dalam Proses Penyelenggaraan Pembangunan Desa.di DesaMuara Bungkal KecamatanSungai Mandau Kabupaten Siak.

Sub Indikator	Kategori Jawaban										N	%
	Sangat sering		Sering		Cukup Sering		Tidak Sering		Tidak Pernah			
	f	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
Kepala desa memonitor kegiatan pelaksanaan pembangunan	-	-	10	17,24	35	60,34	8	13,79	5	8,62	58	100
Memperbaiki penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan	3	5,17	15	25,86	17	29,31	18	31,03	5	8,62	58	100
JUMLAH	3	5,17	25	43,01	75	89,65	18	44,89	5	17,24	232	100

Sumber data : hasil penelitian lapangan,2012

Dari tabel diatas dapat diketahui tanggapan responden mengenai kemampuan kepala desa mengawasi aktifitas-aktifitasdalam proses penyelenggaraan pembangunan desa di Desa Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak termasuk pada kategori “sangat mampu”, sebanyak 3 orang responden atau 5,17%, bahwa kepala desa mengawasi aktifitas pembangunan desa, tanggapan responden pada kategori “Mampu” sebanyak 15 orang responden atau 43,1%, berarti kepala desa memonitor aktifitas pembangunan desa, tanggapan responden pada kategori “Cukup Mampu” dikarenakan kepala desa memang mengawasi aktifitas pembangunan desa, namun kepala desa tidak memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, sebanyak 75 orang responden atau 89,65 %, dan tanggapan pada kategori “Kurang Mampu” dikarenakan terjadinya penyimpangan yang terjadi dalam aktifitas-aktifitaspembangunan desa dan kepala desa tidak segera memperbaikinya sebanyak 18 orang responden atau 44,89 % sedangkan tanggapan responden pada kategori “Tidak Mampu” sebanyak 5 orang atau 17,24 %

Ini dapat disesuaikan Dengan hasil wawancara dengan ketua BPD desa Muara Bungkal (Tanggal 23 April 2012) mengatakan :

”Kepala desa kurang tanggap atau tidak peduli dengan adanya penyimpangan yang terjadi dilokasi pembangunan. Penyimpangan yang terjadi menurut pengetahuan kami berupa: pengurangan bahan material, pengurangan jam kerja, kurang disiplin dalam menjaga dalam keselamatan kerja, akan tetapi kepala desa tidak segera memperbaiki penyimpangan tersebut sehingga pembangunan tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan”

Adapun tanggapan responden pada kategori cukup mampu lebih banyak dikarenakan kepala desa memiliki kemampuan dalam mengawasi aktifitas-aktifitas dalam penyelenggaraan pembangunan desa, dengan meninjau langsung lokasi pembangunan akan tetapi kepala desa tidak memperbaiki penyimpangan yang terjadi di lokasi pembangunan.

5.3 Analisis Data

Dari indikator-indikator variabel pada penelitian ini, maka selanjutnya dapat disimpulkan analisis tanggapan responden mengenai Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam kerangka otonomi Desa Di Desa Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak pada tabel berikut :

Tabel V.38: Rekapitulasi Keseluruhan Hasil Penelitian Tentang Fungsi Kepala Desa Dalam kerangka Otonomi Desa di Desa Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak.

Sub Indikator	Kategori Jawaban										N	%
	Sangat mampu		Mampu		Cukup Mampu		Kurang Mampu		Tidak Mampu			
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
Melaksanakan pembinaan masyarakat desa	2	1,15	22	12,64	74	42,53	49	28,16	21	12,07	174	100
Melaksanakan pembinaan perekonmian desa.	3	2,59	21	18,10	46	39,66	40	34,48	6	5,17	116	100
Memilihara ketentram-an dan ketertiban dan masyarakat desa.	14	12,07	18	15,52	60	51,72	22	18,97	2	1,72	116	100
Melaksana-kan musyawarah penyelesaian perselisihan masyarakat desa.	8	6,90	11	9,48	39	33,62	55	47,41	3	2,59	116	100
Menyusun dan merancang peraturan peraturan desa dengan persetujuan BPD	2	1,72	9	7,76	39	33,62	55	47,41	19	16,38	116	100
Membuat perencan-aan pembangunan sesuai dengan kebutuha desa.	6	2,59	38	16,38	94	40,52	64	27,59	23	9,91	232	100
Memberi kan pengarahan kepada bawahan atau masyara-kat dalam pelaksan-aan pembaguna	8	13,79	45	77,85	41	70,60	20	34,48	2	3,44	174	100
Mengambil keputusan dalam dalam proses penyelenggaraan pembangunan.	13	7,47	16	9,20	81	46,55	60	34,48	4	2,30	174	100
Mengkoordinnir penyelenggaraan pembangunan	1	0,86	14	12,07	40	34,48	38	32,76	23	19,83	116	100
Mengawasi semua aktifitas-aktifitas dalam proses penyelenggaraan pembangunan desa	3	5,17	25	43,01	75	89,65	18	44,89	5	17,24	116	100
JUMLAH	60	4,31	219	15,73	582	41,81	421	30,24	108	7,75	1450	100

Sumber data : hasil penelitian lapangan, 2012

Keterangan :

F : Frekuensi.

% : Persentase

Dari persentase rata-rata kualitatif yang diperoleh diatas adalah persentase pelaksanaan fungsi kepala desa dalam kerangka otonomi desa di desa Muara Bungkal kecamatan sungai mandau kabupaten siak.untuk memahami baik atau tidaknya pelayanan yang dilakukan maka akan diberi ukuran **(Husaini Usman,2009:146)**

$$\begin{aligned}
 \text{Sangat Mampu} & : 60 \times 5 = 300 \\
 \text{Mampu} & : 219 \times 4 = 876 \\
 \text{Cukup Mampu} & : 582 \times 3 = 1746 \\
 \text{Kurang Mampu} & : 421 \times 2 = 842 \\
 \text{Tidak Mampu} & : 108 \times 1 = 108 \\
 & = 3872
 \end{aligned}$$

$$F = 3872$$

$$N = 1450 \times 5 = 7250$$

$$P = \frac{3872}{7250} \times 100\%$$

$$P = 53,41\%$$

Dari tabel rekapitulasi seluruh indikator yang digunakan dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa pelaksanaan fungsi kepala desa dalam mewujudkan otonomi desa di desa muara bungkal kecamatan sungai mandau kabupaten siak, masuk dalam kategori **Cukup Baik** hal ini sesuai dengan hasil rekapitulasi jawaban responden secara keseluruhan sebesar **53,41%** atau berada pada jarak interval **41%- 60%**, dikatakan baik karena dalam pelaksanaan fungsi kepala desa, di desa Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak.

Meskipun hasil penelitian berada pada kategori cukup mampu atau cukup baik, akan tetapi dalam pelaksanaannya tentu terdapat kelebihan dan kekurangan yang harus diperhatikan, dan perlu adanya pembenahan agar pelaksanaan fungsi kepala desa dalam mewujudkan otonomi desa muara bungkal kecamatan sungai mandau kabupaten siak. Menuju kearah yang lebih baik, disini kepala desa berupaya memberikan pelayanan dengan baik kepada masyarakat dan melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan desa Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak. Namun disini kepala desa kurang mampu mengajak masyarakat untuk bekerjasama dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat atau mengikuti kegiatan-kegiatan di desa, dan kurangnya kerja sama dan koordinasi dengan elemen-elemen atau kelompok yang ada dimasyarakat.sehinga kegiatan-kegiatan di desa kurang terlaksana degan baik.

Hambatan- Hambatan Dalam Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam kerangka Otonomi Desa, di Desa Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak adalah sebagai berikut :

1. Kemampuan kepala desa dalam melaksanakan pebinaan masyarakat desa adalah :
 - a. Tidak terkumpulnya data mengenai potensi desa dan kemauan masyarakat karena mereka sulit untuk dikumpulkan dalam pelatihan dan bimbingan penyuluhan.
 - b. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembinaan yang dilaksanakan.

2. Kemampuan dalam melaksanakan pembinaan perekonomian desa adalah :
 - a. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pengarahannya yang disampaikan kepala desa dalam pembinaan perekonomian tersebut.
 - b. Masyarakat hanya mau berpartisipasi apabila tidak mengganggu pekerjaannya sehari-hari.
3. Kemampuan dalam memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa adalah :
 - a. Sulitnya mengumpulkan masyarakat dalam musyawarah mengenai ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
 - b. Keluhan –keluhan masyarakat dalam keamanan lingkungan kurang ditanggapi.
 - c. Masyarakat hanya mau ikut serta dalam menjaga ketentraman dan ketertiban apabila diberi gaji atau upah.
4. Kemampuan dalam melaksanakan musyawarah penyelesaian perselisihan masyarakat desa adalah :
 - a. Sulitnya mengumpulkan masyarakat yang terlibat perselisihan dalam musyawarah untuk menyelesaikannya.
 - b. Keputusan yang diambil cenderung dipaksakan karena masyarakat yang terlibat perselisihan tidak mau mengalah satu sama lain.

5. Kemampuan dalam menyusun dan merancang peraturan desa dengan persetujuan BPD adalah :
 - a. Peraturan desa yang dihasilkan kurang menyentuh kepentingan masyarakat kecil kebawah.
 - b. Rendahnya pemahaman kepala desa dan anggota BPD dalam menyusun peraturan desa.
 - c. Peraturan desa kurang disosialisasikan kepada masyarakat.
6. Kemampuan dalam membuat perencanaan pembangunan desa adalah:
 - a. Tidak terkumpulnya data mengenai apa yang diinginkan masyarakat dalam pembangunan.
 - b. Masyarakat sebagian kecil kurang aktif dalam muswarah dalam perencanaan pembangunan.
 - c. Sulit menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan.
7. Kemampuan dalam memberikan pengarahan kepada bawahan atau masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan adalah :
 - a. Sulitnya mengumpulkan masyarakat desa untuk diberi pengarahan mengenai pelaksanaan pembangunan.
 - b. Rendahnya pemahaman masyarakat dalam menyerap penarahan yang disampaikan kepala desa.

8. Kemampuan dalam mengambil keputusan dalam proses penyelenggaraan pembangunan adalah :
 - a. Sulitnya mengambil keputusan karena banyaknya kebutuhan masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat.
 - b. Rapat dalam mengambil keputusan sering hanya dihadiri oleh aparat desa dan tokoh masyarakat saja sedangkan masyarakat hanya hadir kadang-kadang.
 - c. Dalam mengambil keputusan kepala desa sering dihadapkan pada pertentangan antara kelompok masyarakat dan masyarakat banyak.
9. Kemampuan dalam mengkoordinir penyelenggaraan pembangunan desa adalah :
 - a. Kurangnya kemampuan kepala desa untuk mengkoordinir tugas-tugas penyelenggaraan pembangunan.
 - b. Masyarakat yang diajak dalam pembangunan tidak bisa diajak secara suka rela.
10. Kemampuan dalam mengawasi aktifitas-aktifitas dalam proses penyelenggaraan pembangunan desa :
 - a. Kurangnya pengawasan yang dilakukan kepala desa karena jarang datang kelokasi pembangunan.
 - b. Pelaksanaan pembangunan kurang tepat waktu dalam penyelesaiannya karena banyak penyimpangan yang terjadi dilokasi pembangunan.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

- a. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta keterangan dari responden yaitu masyarakat Desa Muara Bungkal melalui kuesioner dan wawancara langsung, maka pada bab ini penulis dapat menarik kesimpulan dari hasil penelitian mengenai *Analisis Fungsi Kepala Desa Dalam Kerangka Otonomi Desa Di Desa Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak*. dapat disimpulkan Fungsi Kepala Desa Dalam kerangka Otonomi Desa Di Desa Muara Bungkal berada pada kategori **“Cukup Mampu”** dengan persentase **53,41%**.
- b. Hambatan- Hambatan Dalam Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam kerangka Otonomi Desa, di Desa Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak adalah sebagai berikut :
 1. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan- kegiatan pembinaan yang dilaksanakan.
 2. Rendahnya pemahaman masyarakat dalam menyerap pengarahan yang disampaikan kepala desa.
 3. Rapat hanya sering dihadiri oleh aparat desa dan tokoh masyarakat saja sedangkan masyarakat hanya hadir kadang- kadang.

6.2. Saran

Selain itu sebagai pelengkap penulis juga mengemukakan saran-saran untuk menambah bahan masukan bagi pihak yang membutuhkan dan yang berkepentingan. adapun saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah :

1. Diharapkan kepala desa lebih bisa mengajak masyarakat untuk berkerjasama dalam menciptakan ketentraman, dan ketertiban, atau kegiatan-kegiatan desa yang lainnya.
2. Diharapkan dalam mengoordinasi penyelenggaraan pemerintah desa hendaknya selalu berkerjasama dengan elemen-elemen atau kelompok masyarakat yang ada di desa muara bungkal kecamatan sungai mandau kabupaten siak.

Awang, Azam, *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah desa*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010

Dedi, *otonomi penyelenggaraan pemerintah desa*, Jakarta, 2002.

Nurcholis, Hanif, *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta : Erlangga, 2011

Nadraha, Taliziduhu. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*: Jakarta, Rineka Cipta, 1997

_____, *Dimensi-Dimensi Pemerintah Desa*, Jakarta, Rineka Cipta.

Peraturan Daerah Kabupaten Siak No 14 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

R, Fitriyani, Skripsi *Analisis Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Bantayan Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir*, Pekanbaru : 2009

Rivai, Veithzal, *Kepemimpinan dan Prilaku Organisasi*, Jakarta : PT. Gtafindo, 2004

Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: CV. Alfabeta, 2007

Siagian, Sondang P, *Administrasi Pembangunan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2000

Syahwarman, *pelaksanaan fungsi kepala desa dalam mewujudkan otonomi desa, di kepenghuluan pulau halang muka kecamatan kubu kabupaten rohil*. 2008

Umar, Husein, *Metode Riset Ilmu Administrasi*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004

_____, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta : Bumi Aksara, 2009

UUD NO 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Widjaja, Haw, *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa* (Menurut PP No 8 Tahun 2005), Jakarta: Persada, 2002

_____, *Otonomi Desa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004

_____, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta : 200

_____, *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*, Rajawali Pers, Jakarta : 2009

Wasistiono, Sadu, *Prospek Pengembangan Desa*, Bandung: Fokus Media, 2007

Widya, Wicaksono Kristian, *Administrasi dan Birokrasi Pemerintah*, Graha Ilmu, Yogyakarta: 2006

Wasistiono, Sadu, *Prospek Pengembangan Desa*, Bandung: Fokus Media, 2007

UUD NO 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Zuriah, Nurul, *Metode Penelitian Sosial Dan Pendidikan*, Malang, Bumi Aksara, 2005